

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi November | Tahun 2023 No. 49

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Fraksi PKS Tegaskan

Israel Penjahat Perang



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA



Kemerdekaan Palestina: Suara Rakyat Melampaui Batas Negara

Tidak dapat dipungkiri dan terlihat jelas perbedaan pandangan antara rakyat dan pemerintah dibanyak negara. Rakyat gemas, tapi pemerintah terkesan bungkam. Amarah rakyat tidak didengar dengan serius, dan keadaan semakin memburuk.

Berulang kali, dunia menyoal penderitaaan Tanah Palestina yang terus perangkap dalam cengkeraman penjajahan Israel. Tragedi kemanusiaan saat ini, terutama di Gaza, tidak hanya mencoreng citra keadilan, tetapi juga mengungkapkan betapa rapuhnya kepedulian dan sensitifitas pemimpin dunia di tengah-tengah konflik yang tak berkesudahan. Lebih dari sebulan, bom-bom Israel telah merobek kehidupan lebih dari 12,000 orang Palestina. Yang paling menyayat hati, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan wanita, yang kehilangan nyawa mereka di tempat kelahiran dan tempat tinggal leluhur mereka.

Di tengah kehancuran ini,

kepemimpinan dunia seakan terdiam dalam memprotes aksi pembantaian yang terus berlangsung. Namun, Rakyat dari tanah Eropa hingga benua Amerika sampaikan suara protes dan dukungan Kemerdekaan solidaritas Palestina merayap seperti gelombang tsunami. Rakyat dari berbagai negara bersatu untuk satu tujuan: #FreePalestine.

Tidak dapat dipungkiri dan terlihat jelas perbedaan pandangan antara rakyat dan pemerintah dibanyak negara. Rakyat gemas, tapi pemerintah terkesan bungkam. Amarah rakyat tidak didengar dengan serius, dan keadaan semakin memburuk.

Mengapa suara rakyat du-

nia belum memotivasi PBB untuk bertindak lebih tegas? Mengapa aksi konkrit yang diambil masih terasa minim respon dari Para Pemimpin Dunia?

Alhamdulillah, Kita bersyukur kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia satu tarikan napas dengan kegelisahan rakyat dan Bangsa Indonesia. Bersatu padu, berbagi peran mendukung Kemerdekaan Palestina. Mengecam dengan keras dan tegas Penjajahan Israel.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sejak awal serangan Israel ke Gaza, bersikap tegas! Kritik dan protes keras tidak hanya terdengar di dalam negeri, tapi juga di arena internasional. Misi diplomatik dilakukan di berbagai forum dunia, dengan

seruan kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah konkret.

Perjuangan untuk pembebasan Palestina tidak hanya sekadar tagline politik, tetapi sebuah amanat konstitusi bagi bangsa Indonesia. PKS, sebagai salah satu pemain dalam panggung politik, telah melakukan langkah-langkah konstitusional, memanfaatkan platform politik dan diplomatik untuk menekankan urgensi mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.

Momen ini menjadi sebuah cermin betapa pentingnya peran aktif pemerintah, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pemain yang mengemban amanat kemanusiaan dan

konstitusi. Solidaritas rakyat dan upaya konstitusional fraksi politik seperti PKS menyoroti perbedaan sudut pandang yang mungkin harus diatasi untuk mencapai keadilan yang sejati.

Perjuangan untuk membebaskan Palestina bagi bangsa Indonesia bukan sekadar tuntutan moral, namun juga amanat konstitusi. Inilah sebuah kontribusi sejarah yang harus ditegakkan.

Sebagai suara moral, PKS mengingatkan bahwa keheningan dunia tidak bisa lagi menjadi opsi. Saatnya bagi semua pihak, baik individu maupun negara, untuk bersatu dalam mengakhiri penderitaan di Tanah Palestina dan menegakkan hak kemerdekaan yg selama ini teraniaya.



Fraksi PKS Tegaskan Israel Penjahat Perang!

Jakarta (05/11) -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai agresi brutal yang dilakukan Israel di wilayah Gaza Palestina layak disebut kejahatan kemanusiaan dan Israel harus diseret ke Mahkamah Pidana Internasional sebagai penjahat perang.

Penegasan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di Jakarta, Sabtu, (04/11/2023).

Menurut Jazuli apa yang terjadi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan terbesar dan agresi yang dilakukan Israel sangat brutal melampaui batas-batas kemanusiaan yang beradab. Berbagai aturan hukum humaniter internasional diabaikan Israel, semua yang tidak dibolehkan dalam perang dilakukan oleh Israel.

"Kita semua menyaksikan di depan mata dan liputan berbagai media, Israel membombardir rumah dan pemukiman warga Gaza, membom rumah sakit, tempat pengusian, bahkan terakhir membom mobil ambulance yang mengevakuasi korban. Sungguh biadab!," ungkap Jazuli.

Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia ini meminta Komisi HAM PBB untuk segera menginvestigasi kejahatan perang Israel sejak agresi brutal pada 7 Oktober lalu dan menyeret Israel ke Mahkamah

Pidana Internasional sebagai penjahat perang.

"Tidaklah dunia punya nurani. Akankah kita membiarkan ribuan rakyat sipil, anak-anak, ibu-ibu dan orang tua merenggang nyawa di tangan mesin perang Israel. Kami tegas meminta ini harus dihentikan segera," tegas Jazuli.

Israel harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensi keras atas tragedi kemanusiaan di Gaza Palestina.

Bahkan, lanjut Jazuli, Fraksi PKS telah mengundang pakar-pakar HAM dan kemanusiaan dunia seperti dari Italia, Indonesia, dan Malaysia dalam Seminar Internasional Fraksi PKS berbicara tentang Palestina pada Selasa, 31/11/2023.

"Mereka semua tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel jelas merupakan kejahatan kemanusiaan dan hal ini telah berlangsung berpuluh tahun. Bahkan, pakar kemanusiaan mengatakan bahwa bom-bom yang dijatuhkan Israel ke Gaza lebih brutal dari bom Hiroshima dan Nagasaki karena jelas-jelas menasar rakyat dan fasilitas sipil," pungkas Jazuli.

"Mereka semua tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel jelas merupakan kejahatan kemanusiaan dan hal ini telah berlangsung berpuluh tahun. Bahkan, pakar kemanusiaan mengatakan bahwa bom-bom yang dijatuhkan Israel ke Gaza lebih brutal dari bom Hiroshima dan Nagasaki karena jelas-jelas menasar rakyat dan fasilitas sipil,"

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



”
Apa yang terjadi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan terbesar dan agresi yang dilakukan Israel sangat brutal melampaui batas-batas kemanusiaan yang beradab. Berbagai aturan hukum humaniter internasional diabaikan Israel, semua yang tidak dibolehkan dalam perang dilakukan oleh Israel.

**Dr. H. JAZULI
JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Fraksi PKS Tegaskan

**Israel
Penjahat
Perang!**



Politisi PKS Berharap Bantuan Kesehatan dari Indonesia Benar-benar Bisa Masuk ke Gaza

Jakarta (04/11) — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati berharap Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bisa mengupayakan bantuan alat dan bahan kesehatan bisa masuk ke Gaza.

Saat ini Pemerintah bersiap mengirimkan bantuan tahap pertama untuk Palestina melalui perbatasan Rafah di Mesir. Bantuan tahap pertama yang dibawa berupa alat kesehatan, peralatan medis, hygiene kit, winter equipment, medical assistance, bahan

makanan, dan sleeping bag dengan total berat 51,1 ton bantuan.

"Kami mengharapkan diplomasi pemerintah bisa memastikan bantuan alat dan bahan medis terutama bisa masuk ke Gaza. Sebab informasi yang kami terima, fasilitas kesehatan di dalam Gaza sudah banyak yang kolaps. Sehingga dukungan dari masyarakat Indonesia benar-benar bisa bermanfaat sesuai dengan kebutuhan di sana," ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (04/11).

Kurniasih menerangkan, dalam berbagai berita disebutkan jika rumah sakit-rumah sakit di Gaza terpaksa melakukan penghematan bahan medis seperti obat bius yang digunakan untuk operasi. Bahan-bahan medis yang seharusnya sekali pakai (disposable) juga terpaksa dipakai ulang karena keterbatasan alat medis.

"Kami mengharapkan diplomasi pemerintah bisa memastikan bantuan alat dan bahan medis terutama bisa masuk ke Gaza. Sebab informasi yang kami terima, fasilitas kesehatan di dalam Gaza sudah banyak yang kolaps.

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Kurniasih mengatakan Kementerian Kesehatan sekarang memiliki tenaga cadangan kesehatan dan sudah memiliki pengalaman bantuan internasional saat banjir Pakistan dan gempa Turki. Ia berharap saat ini bantuan kemanusiaan Indonesia bisa benar-benar masuk dan menolong masyarakat Gaza yang terhimpit dari semua sisi.

"Rumah sakit dihancurkan, ambulans ditarget, tenaga kesehatan disasar. Jumlah pasien overload, ini sudah masuk teritori kejahatan kemanusiaan karena dengan sengaja melumpuhkan layanan kesehatan sembari terus dengan sengaja menyasar masyarakat sipil dan jatuh korban jiwa," terangnya dia.

Kurniasih pun mengucapkan selamat bertugas kepada kontingen kemanusiaan Indonesia yang terdiri dari bantuan NGO serta Pemerintah untuk membawa misi kemanusiaan ke Palestina.



Aleg PKS Ajak Seluruh Anggota DPR RI Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Jakarta (31/10) — Anggota Fraksi PKS DPR RI, Syahrul Aidi Maazat memberikan pernyataan sikap mendukung terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 DPR RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (31/10).

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Palestina ini, bersama Anggota DPR RI lain dari Fraksi PKS mengenakan syal Palestina sebagai bentuk dukungan dan solidaritas kepada rakyat dan bangsa Palestina.

"Perang Israel telah menewaskan 7.028 syuhada dan 18.484 korban luka-luka. Dari korban perang tersebut,

66% diantaranya adalah anak-anak dan perempuan. Palestina bukan saja kehilangan nyawa, di bidang kesehatan, Palestina juga kehilangan banyak fasilitas kesehatan." ujar Syahrul.

Syahrul juga mengungkap bahwa Pemerintah Gaza telah mengumumkan bahwa sistem kesehatan Gaza telah hancur total.

"Israel akan terus memberikan serangan kepada Palestina dengan dukungan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa," imbuhnya.

Indonesia, menurut Syahrul, memiliki hutang sejarah kepada Palestina saat Indonesia baru merdeka karena Palestina menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

"Indonesia harus melakukan langkah strategis untuk menghentikan segala

kejahatan kemanusiaan Israel kepada Palestina, khususnya dalam forum-forum internasional," tegas Syahrul.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada delegasi parlemen Indonesia yang dipimpin yang terhormat Ketua DPR RI di India yang berupaya memasukkan rekomendasi penghentian serangan. Kami juga mengapresiasi sikap Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi dalam sidang Dewan Keamanan PBB dengan ketegasan sikap yang luar biasa." ucap Syahrul.

Sebagai penutup, Syahrul mengajak seluruh anggota dewan serta masyarakat Indonesia untuk berdoa bersama agar Allah menguatkan perjuangan dan segera mewujudkan Palestina yang merdeka.

"Indonesia harus melakukan langkah strategis untuk menghentikan segala kejahatan kemanusiaan Israel kepada Palestina, khususnya dalam forum-forum internasional,"

**Dr. H. SYAHRUL AIDI
MAAZAT, Lc., M.A.**

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI



Ikut Aksi Bela Palestina, Ketua FPKS: Stop Penjajahan Israel, Wujudkan Kemerdekaan Palestina

Jakarta (28/10) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini berbaur dengan massa aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta (Sabtu, 28/10/2023).

Aksi yang diikuti lebih dari 1 juta massa ini mendesak Israel dan negara-negara penyokongnya untuk berhenti menjajah rakyat dan tanah Palestina.

Menurut Jazuli Juwaini aksi massa terbesar ini menunjukkan solidaritas bangsa Indonesia terhadap

nasib rakyat Palestina yang hari ini dibombardir Israel khususnya di wilayah Gaza.

"Rakyat Palestina tidak sendirian. Kami berdiri di belakng rakyat Palestina hingga meraih kemerdekaannya. Apa yang terjadi di Gaza, sakit dan kepedihan yang mereka rasakan, juga sangat dirasakan rakyat Indonesia," ungkap Jazuli.

Menurut Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia ini, tidak harus menjadi muslim untuk bisa merasakan penderitaan rakyat Gaza Palestina, cukuplah kita menjadi manusia biasa.

"Oleh karena itu masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Masalah hak asasi manusia, hak hidup, hak merdeka dan hak lepas dari penjajahan, pembunuhan serta penindasan dari kebiadaban penjajah Israel," tegasnya.

Anggota DPR Dapil Banten ini menyerukan sudah saatnya Palestina mendapatkan

kemerdekaannya yang telah dirampas sejak 1948. Dan Indonesia punya hutang sejarah. Dunia punya hutang sejarah. Seluruh umat manusia di dunia punya hutang sejarah terhadap rakyat Palestina.

"Mari terus galang solidaritas global untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Katakan bahwa kita tidak berhenti mendukung kemerdekaan Palestina dengan segala upaya. Kekejaman Israel harus dihentikan. Israel harus diseret ke Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang dan pelaku genocida umat manusia," ungkapnya.

"Kita semua cinta perdamaian. Kita semua tidak ingin ada pertumpahan darah diantara umat manusia. Dan, satu-satunya jalan menghadirkan perdamaian dunia adalah mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina dan menghentikan kebiadaban Israel," pungkas Jazuli.

"Mari terus galang solidaritas global untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Katakan bahwa kita tidak berhenti mendukung kemerdekaan Palestina dengan segala upaya. Kekejaman Israel harus dihentikan.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Aleg PKS Dukung Penuh Rencana TNI Kirim Kapal Rumah Sakit Bantu Palestina

Jakarta (07/11) — Kesiapan TNI untuk mengirim kapal rumah sakit ke Palestina sebagaimana disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subiyanto, mendapat dukungan penuh Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta.

Menurut Sukamta, rencana ini merupakan bukti keberanian luar biasa yang dimiliki oleh TNI untuk mendukung tindakan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga Gaza Palestina

"Kondisi layanan kesehatan di Gaza bisa dikatakan hampir lumpuh berdasar laporan

"Kondisi layanan kesehatan di Gaza bisa dikatakan hampir lumpuh berdasar laporan yang kita dapatkan. Tidak ada obat-obatan, sarana rumah sakit hancur, tenaga medis banyak yang menjadi korban. Sementara setiap hari ratusan meninggal dunia dan ribuan terluka akibat pengeboman yang membabi buta oleh pihak Israel. Oleh sebab itu bantuan berupa pengiriman kapal rumah sakit yang akan dilakukan oleh TNI adalah langkah yang sangat tepat dan perlu dilakukan segera

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

yang kita dapatkan. Tidak ada obat-obatan, sarana rumah sakit hancur, tenaga medis banyak yang menjadi korban. Sementara setiap hari ratusan meninggal dunia dan ribuan terluka akibat pengeboman yang membabi buta oleh pihak Israel. Oleh sebab itu bantuan berupa pengiriman kapal rumah sakit yang akan dilakukan oleh TNI adalah langkah yang sangat tepat dan perlu dilakukan segera," tegasnya.

Sukamta menyatakan pengiriman kapal rumah sakit TNI akan mendorong banyak negara juga akan melakukan tindakan yang lebih berani menembus pembatasan akses

bantuan kemanusiaan yang selama ini mendapat ancaman Israel. Sementara pintu perbatasan Rafah hanya membolehkan bantuan secara terbatas yang bisa masuk.

"Semakin cepat pengiriman kapal rumah sakit ini dilaksanakan tentu semakin baik, karena tentu butuh waktu cukup lama kapal bisa mencapai perairan Gaza," ujarnya.

Lebih lanjut Sukamta meminta Kemenlu bisa membantu segera lobi ke Pemerintah Mesir dan beberapa pihak terkait di Luar Negeri untuk memudahkan akses kapal rumah sakit menuju perairan Gaza.



PKS Tolak Revisi UU Pilkada, Tidak Efisien dan Berpotensi Rusak Demokrasi

Jakarta (25/10) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera membacakan Pandangan Fraksi dalam menyikapi hasil Panja Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat

atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang oleh Panja Badan Legislatif, Rabu, (25/10).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), lanjut Anggota DPR RI Dapil Jakarta I menyampaikan catatan-catatan antara lain, Pertama, Fraksi PKS menilai bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan amanat Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pelaksanaan sistem demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Pilkada yang dilaksanakan secara langsung ini diha-

rapkan dapat menjamin tercapainya kualitas pemerintahan daerah yang berjalan baik dengan dukungan masyarakat seluas-luasnya. Dalam Pilkada langsung, diharapkan partisipasi masyarakat tinggi sehingga Kepala Daerah yang terpilih memiliki tanggung jawab terhadap publik yang besar karena keterpilihannya ditentukan oleh mayoritas masyarakat," jelasnya.

Fraksi PKS, imbu Mardani menilai perumusan kembali jadwal Pilkada harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, meskipun percepatan jadwal Pilkada bisa berdampak positif karena mengurangi waktu jabatan Kepala Daerah yang diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah;

"Kedua, Fraksi PKS beranggapan bahwa

penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Pilkada ini dilakukan dengan tergesa-sega, untuk dilakukan pembahasannya bahkan pada saat masih Masa Reses DPR. Fraksi PKS menilai tidak ada urgensi untuk dengan sesegera mungkin membahas RUU Pilkada ini di Masa Reses DPR yang seharusnya digunakan oleh Anggota untuk terjun langsung melakukan aktivitas di tengah-tengah masyarakat," tegasnya.

Ketiga, lanjut Mardani, Fraksi PKS juga menilai penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Pilkada ini terkesan sangat dipaksakan karena RUU Pilkada ini bukan termasuk daftar RUU Prioritas Prolegnas Perubahan Tahun 2023 maupun Tahun 2024.

"Selain itu, Fraksi PKS menilai landasan penyusunan RUU Pilkada ini yang dibahas sebagai RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi juga kurang tepat. Hal ini karena Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian UU Pilkada hanya mengabulkan



pengaturan tentang Panwaslu dan syarat Calon Kepala Daerah, dan tidak ada amanat soal perubahan jadwal Pilkada Tahun 2024 untuk dipercepat pelaksanaannya," pungkasnya.

Keempat, terang Mardani, Fraksi PKS menilai bahwa perubahan jadwal Pilkada dapat berdampak terhadap ketidaksiapan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaksanakan Pilkada sebab rentang waktu Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan Pemilihan Kepala Daerah yang terlalu dekat, terutama apabila Pilpres mengalami dua kali perputaran pemilihan.

"Hal ini akan berdampak terhadap kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu karena rangkaian persiapannya dilakukan dalam

jangka waktu yang hampir bersamaan," tuturnya.

Kelima, imbuhnya, Fraksi PKS berpandangan bahwa percepatan jadwal pelaksanaan Pilkada akan berdampak pada dibutuhkan biaya penyelenggaraan Pilkada yang lebih besar sehingga tidak efisien.

"Hal tersebut disebabkan waktu persiapan Pilkada menjadi lebih singkat sehingga biaya untuk persiapan seperti pengadaan logistik Pilkada, biaya pelatihan petugas, biaya operasional dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Pilkada harus dipersiapkan secara cepat untuk mengejar dipercepatnya waktu pelaksanaan Pilkada," jelasnya.

Keenam, tambah Mardani, Fraksi PKS menilai bahwa percepatan Pilkada 2024



PKS Tolak Revisi UU Pilkada, Tidak Efisien dan Berpotensi Rusak Demokrasi

« SEBELUMNYA

menjadi pada bulan September mengurangi waktu persiapan bagi peserta Pilkada sehingga bisa berpotensi merugikan partai politik yang akan menyiapkan seleksi internal bagi Calon Kepala Daerah yang akan diunggulkan.

"Hal ini disebabkan partai politik tidak memiliki waktu yang cukup memadai dalam membangun soliditas politik internal untuk persiapan pencalonan Kepala Daerah apalagi setelah mengikuti rangkaian kontestasi Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024," urainya.

Ketujuh, Mardani menambahkan, Fraksi PKS berpandangan bahwa dengan percepatan jadwal Pilkada tersebut berdampak pada waktu kampanye menjadi sangat singkat yaitu maksimal 35 hari, sehingga proses kampanye ide dan gagasan kepada masyarakat menjadi lebih terbatas dan tidak optimal.

"Hal ini tentu kurang baik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung karena masyarakat tidak diberi kesempatan yang optimal untuk mengenal kandidat Kepala Daerah. Selain itu, waktu kampanye yang relatif

pendek bisa berpotensi membuat Calon Kepala Daerah melakukan cara-cara instan untuk populer dan dipilih masyarakat, misalnya dengan melakukan politik uang," jelasnya.

Kedelapan, kata Mardani, Fraksi PKS bersikap bahwa percepatan pelaksanaan Pilkada yang sebelumnya diatur pada bulan November 2024 menjadi pada bulan September Tahun 2024 akan menimbulkan prasangka dan kegaduhan masyarakat sehingga bisa mendorong ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu karena sangat kentara dengan kepentingan politik, bukan kepentingan publik.

"Percepatan pelaksanaan Pilkada menjadi pada September 2024 atau satu bulan menjelang berakhirnya masa periode Presiden pada Oktober 2024, bisa menimbulkan spekulasi publik bahwa pemerintah yang sedang berkuasa ingin menggunakan sumber daya pemerintahan yang ada untuk mendukung pasangan Calon Kepala Daerah tertentu sehingga pengaturan ini dinilai hanya untuk menguntungkan kepentingan elitis saja," tegas Wakil Ketua

PKS Bidang Polhukam ini.

Hal ini, lanjutnya, mengingat bahwa pemerintah yang sedang berkuasa mempunyai akses terhadap kebijakan publik dan program sosial yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan peluang kemenangan Calon Kepala Daerah yang didukungnya.

"Berdasarkan catatan kami tersebut, dengan memohon taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan MENOLAK hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan," tutup Ketua DPP PKS ini.



“Percepatan pelaksanaan Pilkada menjadi pada September 2024 atau satu bulan menjelang berakhirnya masa periode Presiden pada Oktober 2024, bisa menimbulkan spekulasi publik bahwa pemerintah yang sedang berkuasa ingin menggunakan sumber daya pemerintahan yang ada untuk mendukung pasangan Calon Kepala Daerah tertentu sehingga pengaturan ini dinilai hanya untuk menguntungkan kepentingan elitis saja,”

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI



Sesalkan Dukungan Capres PP Polri, Adang Daradjatun: Cederai Marwah Organisasi

Jakarta (02/11) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun menyatakan bahwa dukungan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden menyalahi etika dan kodrat netral organisasi.

Hal ini disampaikan dalam sesi wawancara dengan awak media pada Rabu (01/11) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Adang menjelaskan, jika seseorang telah menjadi purnawirawan berarti seseorang itu telah bebas untuk memilih

Jika seseorang telah menjadi purnawirawan berarti seseorang itu telah bebas untuk memilih apapun yang ia kehendaki, termasuk dalam pilihan politik. Kehadiran organisasi purnawirawan yang dalam konteks ini adalah PP Polri, seharusnya harus bersikap netral sebagaimana sikap netral tersebut sudah melekat dalam diri para purnawirawan sejak masih bertugas dahulu.

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

apapun yang ia kehendaki, termasuk dalam pilihan politik. Kehadiran organisasi purnawirawan yang dalam konteks ini adalah PP Polri, seharusnya harus bersikap netral sebagaimana sikap netral tersebut sudah melekat dalam diri para purnawirawan sejak masih bertugas dahulu.

“Kita membahas etika berorganisasi ya, PP Polri itu kan dibentuk dalam rangka suatu organisasi yang betul-betul setia. Setia kepada kepolisian dan negara, jadi harus tidak berpihak kepada salah satu golongan.” ujar Adang.

Dalam penjelasan lain, Adang yang juga pernah menjabat sebagai Wakilpolri mengatakan bahwa saat ini

para anggota PP Polri tentu punya preferensi masing-masing terkait pilihan calon presiden. Dengan adanya keputusan deklarasi dukungan atas nama PP Polri ini dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan internal PP Polri.

“Sebaiknya, PP Polri mempersiapkan para purnawirawan untuk bisa memilih yang calon presiden yang disukai, bukan merupakan hasil Rakerpus.” pungkas Adang.

Pada akhir penjelasannya, Adang juga menyatakan bahwa terdapat beberapa pembina PP Polri yang menyatakan keheranan karena tidak menerima ajakan rapat sama sekali sebelum pernyataan dukungan itu dikeluarkan oleh PP Polri.



Memanasnya Konflik Palestina-Israel, Habib Aboe Ajak Masyarakat Indonesia Beri Dukungan pada Palestina

Jakarta (31/10) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Al-Habsy merespon memanasnya konflik Palestina dengan Israel dan meminta masyarakat selalu memberikan dukungan penuh kepada Palestina.

“Kita akan terus suarakan pembelaan Palestina sampai mereka bisa merdeka. Karena ini adalah bagian dari amanah konstitusi kita,” kata pria yang akrab disapa Habib Aboe

Pria yang kerap disapa Habib Aboe ini mengatakan bahwa Palestina adalah bangsa

“Kita akan terus suarakan pembelaan Palestina sampai mereka bisa merdeka. Karena ini adalah bagian dari amanah konstitusi kita,” kata pria yang akrab disapa Habib Aboe

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

yang memiliki hak untuk merdeka.

Habib Aboe berpesan kepada masyarakat untuk terus mengawal kemerdekaan bagi Palestina karena itu bagian dari amanah konstitusi.

Selain itu, Aboe mengutuk keras tindakan yang dilakukan Israel ke Palestina. Pasalnya, tindakan tersebut tidak berperikemanusiaan dan melanggar ketertiban dunia.

“Tentunya kita juga mengutuk serangan yang dilakukan Israel ke Palestina. Tiga pekan kemarin RS Indonesia di Palestina di serang Israel. Kemudian area dekat RS Al Quds kemarin juga mendapat serangan. Karena tindakan ini tidak berperikemanusiaan dan melanggar ketertiban dunia,” ucap Sekretaris Jenderal DPP

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

“Indonesia memiliki tujuan nasional Indonesia dalam potongan kalimat pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” lanjut Anggota DPR RI dari Dapil Kalsel I ini.

Aboe kemudian mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia perlu memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina.

“Karenanya tidak salah, kalau kita sebagai bangsa Indonesia menyuarakan dengan lantang perjuangan kemerdekaan Palestina. Kita memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan bangsa Palestina,” tutup Aboe Bakar



Aleg PKS Minta Kembalinya Mentan Andi Amran Perkuat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Jakarta (29/10) — Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS Dapil Sulsel 2, Andi Akmal Pasluddin, mengucapkan selamat atas pelantikan kembali Andi Amran Sulaiman (AAS) sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pelantikan Andi Amran Sulaiman ini berlangsung di Istana Negara pada Rabu, (25/10/2023).

Andi Akmal Pasluddin, yang dulu pernah bermitra dengan Menteri Pertanian yang baru saja dilantik, yakni ketika kabinet Indonesia Maju Jilid I dimana presiden Jokowi bersama wapres Jusuf Kalla menyambut dengan gembira amanah yang diberikan kepada Andi Amran Sulaiman.

Dalam pernyataannya, Politisi PKS ini menyampaikan

Jangan ada lagi isu korupsi, jangan lagi ada isu tidak sinkronnya koordinasi antar lembaga. Kita perkuat sektor pertanian mulai dari lembaga besar pemerintahan hingga kelompok-kelompok kecil petani yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,”

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

pesan selamat dan harapannya untuk masa jabatan AAS setahun di ujung pemerintahan Indonesia Maju Jilid II.

“Selamat dan sukses kepada Pak Andi Amran Sulaiman atas amanah yang diberikan sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Saya yakin, dengan latar belakang beliau sebagai seorang Ahli Pertanian dan pengalaman sebelumnya dalam jabatan ini, dunia pertanian kita akan semakin kuat, dan petani kita akan semakin sejahtera,” ungkap Putra Kelahiran Bone ini.

Andi Akmal Pasluddin juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengembangan sektor pertanian.

Akmal meyakini bahwa pengalaman dan pengetahuan AAS dalam bidang pertanian akan memudahkan komunikasi dan kerja sama antara kedua

tingkatan pemerintahan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia.

“Kehadiran Menteri Pertanian yang berpengalaman ini, mesti singkat waktunya, harus menjadi tumpuan kesejahteraan Petani. Jangan ada lagi isu korupsi, jangan lagi ada isu tidak sinkronnya koordinasi antar lembaga. Kita perkuat sektor pertanian mulai dari lembaga besar pemerintahan hingga kelompok-kelompok kecil petani yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kritis Anggota Banggar DPR ini.

Andi Akmal Pasluddin menutup pernyataannya dengan harapan besar bahwa masa jabatan kembali AAS akan membawa manfaat besar bagi negara, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat sektor pertanian Indonesia.



Aleg PKS: Banyaknya Aplikasi Pemerintah Desa Berpotensi Tambah Masalah Baru

Jakarta (02/11) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Toriq Hidayat mengkritisi penambahan aplikasi web based pemerintah desa.

Diketahui, imbuhnya, sistem ‘Dasbor Desa’ dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bersama Kementerian Desa dan

“Pemerintah pusat harus selalu fokus perkuat birokrasi di tingkat daerah. Jangan dibiasakan menghilangkan masalah dengan mengamputati kewenangan dan memberikan tanggungjawab kepada struktur dibawahnya. Untuk kerja jangka panjang, cara ini tidak efektif,”

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

Lembaga lainnya.

“Terlalu banyak aplikasi yang harus dikerjakan oleh aparat desa. Mulai aplikasi SDGs Desa hingga eHDW desa. Harusnya pemerintah cukup membuat satu sistem web based saja. Tapi memiliki fitur-fitur yang mudah diakses, bagaimana platform medsos yang sampai saat ini digandrungi masyarakat dunia,” ujar Toriq.

Politisi asal PKS ini khawatir penyampaian pelaporan dengan menggunakan banyak sistem akan kontra produktif. Alih-alih mendapatkan data yang akurat dan tepat waktu justru sebaliknya. Karena operator harus memilah dan memilih isian untuk setiap aplikasi supaya tidak tumpang tindih.

“Tidak semua desa memiliki sumber daya, sarana dan prasarana yang sama. Bahkan kita tahu infrastruktur

jaringan internet di Indonesia belum merata, apalagi dipedesaan. Karenanya pemerintah pusat harus membuat kebijakan yang adil berdasarkan kondisi desa,” tutur Toriq.

Dia juga menambahkan belum tepat ‘Dasbor Desa’ digunakan untuk memotong birokrasi yang berbelit. Lalu memikulkan beban pencatatan permasalahan desa kepada aparat desa. Seperti rincian kemiskinan, kelaparan, hingga potensi ekonomi desa. Hal ini adalah tupoksi Pemerintah Daerah.

“Pemerintah pusat harus selalu fokus perkuat birokrasi di tingkat daerah. Jangan dibiasakan menghilangkan masalah dengan mengamputati kewenangan dan memberikan tanggungjawab kepada struktur dibawahnya. Untuk kerja jangka panjang, cara ini tidak efektif,” tutup Toriq.



Jokowi Rem Investasi
Luar Negeri di IKN

Hanya 'Gimmick', Belum Ada Dana Turun



"Belum adanya groundbreaking proyek investasi asing di IKN menunjukkan dengan jelas bahwa belum ada satu rupiahpun yang dikururkan dari investor asing ke IKN. Otorita IKN sendiri mengakui bahwa groundbreaking proyek investasi asing baru direncanakan pada kuartal II/2024

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

Jokowi Rem Investasi Luar Negeri di IKN, Aleg PKS: Hanya 'Gimmick', Belum Ada Dana Turun

Jakarta (07/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama merespon sikap pemerintah yang dikabarkan akan mengerem investasi dari luar negeri di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Presiden Joko Widodo (Jokowi), ibunya, berdalih bahwa investor dalam negeri harus diberi kesempatan lebih dahulu, dan meminta kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono untuk mengupayakan penggabungan investasi asing dan dalam negeri.

"Pengereman ini dilakukan dengan alasan banyaknya minat investor asing di IKN. Menteri Basuki sendiri mengatakan ada sekitar 300-an sekian Lol (Letter of Intent) yang ditandatangani Badan Otorita IKN. Di antaranya ada 130 dari Singapura, beberapa dari

Thailand," ungkap Anggota Komisi V DPR RI ini.

Menanggapi hal ini, kata pria yang akrab disapa SJP ini, FPKS melihat bahwa pengereman ini tidak logis.

"Sebab hingga saat ini belum ada satu rupiah pun dana dari investor asing yang diturunkan. Sehingga tidak jelas apa yang direm, sebab pada dasarnya memang investor asing tidak ada yang datang," tegas Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 ini.

Dari 130 investor asing yang diklaim mendukung IKN, ibunya, telah diakui baru

sebatas Lol. Namun belum jelas statusnya sudah maju ke tahap NDA (non-disclosure agreement) atau bahkan mendapat surat izin prakarsa proyek (SIPP).

"Belum adanya groundbreaking proyek investasi asing di IKN menunjukkan dengan jelas bahwa belum ada satu rupiah pun yang dikucurkan dari investor asing ke IKN. Otorita IKN sendiri mengakui bahwa groundbreaking proyek investasi asing baru direncanakan pada kuartal II/2024," terang SJP.

Padahal, ujarnya, Pemerintahan Jokowi sudah banyak sekali melakukan obral peraturan, mulai dari jaminan Pemerintah hingga aturan terkait pertanahan yang bisa dikelola hingga hampir 2 abad melalui revisi UU IKN yang melebihi aturan kolonial.

"Selain itu, pengereman investasi asing secara tiba-tiba ini sangat ironis dengan usaha Jokowi yang sudah mempromosikan IKN ke berbagai negara, seperti Cina, Singapura, Malaysia, Inggris, Arab Saudi, dan lainnya, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat," pungkasnya.

Oleh sebab itu, lanjut SJP, FPKS memandang alasan 'pengereman' investasi luar negeri ini sebatas gimmick untuk menunjukkan seolah-olah investasi di IKN laku keras. Padahal kenyataannya belum ada satu rupiah pun investasi asing yang dikucurkan.



Pemerintahan Jokowi sudah banyak sekali melakukan obral peraturan, mulai dari jaminan Pemerintah hingga aturan terkait pertanahan yang bisa dikelola hingga hampir 2 abad melalui revisi UU IKN yang melebihi aturan kolonial.

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

"Terkait hal ini FPKS meminta Pemerintah memenuhi janjinya bahwa pembangunan IKN akan lebih banyak menggunakan dana investasi dibandingkan APBN," tegasnya.

Namun, jelas SJP, FPKS juga memberi peringatan bahwa aturan main investasi di IKN

harus sama dengan aturan investasi di seluruh Indonesia.

"Sehingga aturan-aturan yang mengobrol hak atas tanah di IKN serta aturan-aturan terkait jaminan Pemerintah harus diperketat kembali agar tidak merugikan negara," tutup SJP.



LRT Jabodebek Mogok, Politisi PKS Tegas Minta Pemerintah Lakukan Audit Mendalam

Jakarta (02/11) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek LRT Jabodebek untuk memastikan penyebab buruknya kualitas trainset LRT Jabodebek.

Audit yang dilakukan, kata Amin, setidaknya mencakup teknologi maupun proses produksinya.

"Rabu 01 November kemarin, rangkaian kereta LRT Jabodebek Cibubur Line - Dukuh Atas dilaporkan sempat mogok ditengah jalan selama tiga menit. Peristiwa ini menambah deretan masalah pada LRT Jabodebek, setelah sebelumnya banyak unit roda yang aus," ungkapnya.

Banyaknya unit roda yang aus, imbuh Amin, menyebabkan manajemen LRT Jabodebek hanya mengoperasikan 9 trainset dari 18 trainset yang biasa beroperasi.

"Hal itu mengakibatkan

waktu tunggu dan keberangkatan LRT menjadi molor karena Sebagian trainset harus masuk ruang perawatan," pungkasnya.

Menurut Amin, audit diperlukan untuk mengetahui kualitas trainset LRT apakah sudah sesuai standard atau belum. Selama ini, PT INKA sudah berpengalaman memenuhi permintaan trainset LRT bagi negara lain, yang tentu saja dari sisi kualitas harusnya sudah terjamin.

"Kalau kemudian ditemukan masalah dengan standard LRT yang digunakan di rute Jabodebek, maka hal itu mencoreng reputasi anak

bangsa dalam inovasi dan teknologi, khususnya transportasi umum," tegas Amin.

Audit dilakukan, lanjutnya, untuk mengetahui apakah ada masalah dengan kualitas bahan bakunya atau proses pengerjaannya. Jika terbukti ada pengurangan kualitas bahan maka ini harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penyelidikan faktor-faktor penyebabnya.

"Saya khawatir ada praktik rente dalam pengadaan trainset LRT, sehingga kualitasnya tidak memenuhi standar".

Lebih lanjut Amin mengungkapkan pada Agustus 2023 lalu, pihak Siemens yang ditunjuk sebagai pemasok dan pengelola software untuk operasional LRT Jabodebek memprotes adanya ketidaksesuaian teknis pada 31 trainset LRT buatan PT INKA sehingga tidak kompatibel dengan sistem atau software untuk pengoperasiannya.

Amin kembali menegaskan pentingnya audit ini dari sisi reputasi kemampuan penguasaan teknologi anak bangsa.

"Jangan sampai reputasi anak bangsa rusak gara-gara penyimpangan yang terkait dengan faktor non teknis produksi, misalnya praktik rente sehingga terjadi pengurangan kualitas bahan baku. Selama ini kita berjuang agar anak bangsa diberikan kepercayaan. Kita juga mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan



"Jangan sampai reputasi anak bangsa rusak gara-gara penyimpangan yang terkait dengan faktor non teknis produksi, misalnya praktik rente sehingga terjadi pengurangan kualitas bahan baku. Selama ini kita berjuang agar anak bangsa diberikan kepercayaan. Kita juga mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan impor,"

AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

impor," jelasnya.

Buruknya kualitas trainset LRT, kata Amin, bisa menurunkan kepercayaan publik akan kemampuan anak bangsa. Padahal bisa jadi persoalannya bukan pada kemampuan para insinyur kita, namun karena faktor lain.

"Jangan sampai karena nilai setitik rusak susu

sebelanga. Jika dibiarkan, hal ini akan membuat industri kereta api kita sulit melangkah lebih jauh. Padahal kita sedang membangun kepercayaan publik terhadap kemampuan anak bangsa dalam urusan teknologi perkeretaapian," tutup Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur IV ini.



Aleg PKS Anggap Sudah Seharusnya Harga BBM Non- subsidi Pertamina Turun

Jakarta (03/11) -- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menganggap kebijakan Pertamina menurunkan harga BBM nonsubsidi saat tren harga minyak dunia turun sebagai hal yang sudah seharusnya.

Mulyanto menambahkan, kondisi tersebut karena mengacu mekanisme pasar maka harga minyak nonsubsidi Pertamina sudah sewajarnya turun, ketika harga minyak dunia turun.

Apalagi sebelumnya Pertamina sudah menaikkan harga BBM nonsubsidi cukup tinggi di bulan September 2023, ketika harga minyak dunia bergejolak naik.

"Jangan sampai muncul kesan tidak baik, yakni ketika harga minyak dunia naik Pertamina gercep menaikkan harga BBM-nya, sementara sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun, Pertamina ogah-ogahan untuk menurunkannya. Seperti pernah terjadi di awal pandemi Covid-19. Ini kan tidak konsisten dengan mekanisme pasar," kata Mulyanto.

Mulyanto melihat dalam beberapa waktu ke depan memang kecenderungannya harga minyak dunia ini terus turun. Apalagi setelah PBB memutuskan untuk melakukan gencatan senjata di Timur-Tengah.

Harga minyak WTI,

misalnya, sampai bulan Juli 2023 sudah menyentuh angka USD67 per barel. Kemudian karena memanasnya kondisi Timur Tengah, kembali harga minyak dunia naik dan mencapai puncaknya di akhir September 2023 menjadi USD97 per barel. Namun, sekarang sudah turun kembali menuju USD80 per barel.

Indonesia sendiri mengikuti acuan harga minyak

rerata Platts Singapura yang Secara umum polanya serupa. Sehingga sudah sepatutnya harga jual BBM nonsubsidi di Indonesia turun.

"Jadi penurunan harga BBM nonsubsidi yang dilakukan Pertamina kali ini sebagai sesuatu yang wajar. Justru aneh kalau kebijakan itu tidak diambil karena secara bisnis akan merugikan Pertamina sendiri. Sebab harga BBM nonsubsidi sejenis di pompa bensin non Pertamina sudah turun. Jadi kalau Pertamina bertahan dengan harga lama bisa menyebabkan terjadinya migrasi pelanggan ke SPBU lain," kata Mulyanto.

"Jangan sampai muncul kesan tidak baik, yakni ketika harga minyak dunia naik Pertamina gercep menaikkan harga BBM-nya, sementara sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun, Pertamina ogah-ogahan untuk menurunkannya. Seperti pernah terjadi di awal pandemi Covid-19. Ini kan tidak konsisten dengan mekanisme pasar,"

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI



Raker Dengan Menag Soal Haji, HNW Perjuangkan Kuota Haji bagi Diaspora RI di Luar Negeri

Jakarta (07/11) — Anggota DPR-RI Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi langkah telah dibukanya pendaftaran haji bagi diaspora di Malaysia dan Hongkong, sebagaimana diinisiasi oleh BPKH dan Bank Muamalat.

Anggota DPR-RI yang terpilih dari Dapil DKI Jakarta II meliputi Luar Negeri ini mengingatkan, jika memang ini menjadi kebijakan perhajian ke depan, maka supaya adil, layanan serupa harusnya juga dibuka untuk diaspora Indonesia di negara-negara lainnya.

“Kemenag penting bisa berkoordinasi dengan BPKH dan Bank Muamalat agar pendaftaran haji selain di Hongkong dan Malaysia, juga dibuka bagi diaspora Indonesia di seluruh negara. Tetapi pihak

Kemenag/Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan komunikasi/lobi kepada Pemerintah Saudi atau pihak terkait, agar jamaah haji diaspora Indonesia itu tidak mengurangi kuota haji untuk Indonesia,” disampaikan Hidayat pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Kemenag, Senin (06/11/2023)

HNW sapaan akrabnya menjelaskan, saat ini kuota haji Indonesia adalah 221 ribu jamaah, dan jumlah jamaah tunggu mencapai sekitar 5 juta

jamaah di dalam negeri.

Dengan kondisi tersebut, waktu tunggu haji sudah mayoritas di atas 20 tahun, bahkan ada yang sampai hampir 50 tahun di beberapa daerah di Indonesia.

“Oleh karena itu sangat solutif jika Kemenag bersama BPKH membuka perjalanan haji bagi diaspora di Luar Negeri, dengan menggunakan misalnya kuota yang tidak terpakai di negara tempat diaspora tersebut,” sambungnya.

Selain soal diaspora, dirinya juga menyoroti besarnya nilai utang-piutang dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023.

“Total transaksi utang piutang dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan haji mencapai lebih dari Rp 1 Triliun. Ini jumlah yang cukup besar dan jika terus dibiarkan, khawatir menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa ibadah haji dibiayai dengan utang,” ujarnya.

Berdasarkan paparan Menteri Agama soal laporan keuangan haji, terdapat penerimaan utang piutang sebesar Rp 386,6 Miliar, dan pengeluaran utang piutang sebesar Rp 737,8 Miliar, sehingga ada selisih negatif sebesar Rp 351 Miliar.

“Setelah saya kritik soal besaran utang tersebut, Menag sampaikan bahwa itu hanya kegiatan administratif, seperti



“Setelah saya kritik soal besaran utang tersebut, Menag sampaikan bahwa itu hanya kegiatan administratif, seperti utang-piutang pajak dan transaksi perbankan. Kami tetap tagih penjelasan detail tiap komponennya, sehingga tidak terjadi mispersepsi di publik,”

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

utang-piutang pajak dan transaksi perbankan. Kami tetap tagih penjelasan detail tiap komponennya, sehingga tidak terjadi mispersepsi di publik,” lanjutnya.

Anggota DPR-RI Fraksi PKS

ini juga menyoroti masih belum selesainya pembayaran kewajiban terkait penyelenggaraan haji tahun 2023.

Selengkapnya kunjungi fraksidpar.pks.id



Anggota FPKS Minta Kemensos Perkuat Verivali Sebelum Hapus Warga Miskin dari DTKS

Jakarta (07/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya meminta Kementerian Sosial memperkuat verifikasi dan validasi (verivali) data sebelum menghapus keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Desakan itu Wisnu sampaikan merespons keluhan warga di lapangan.

“Ada 1 KK dengan 7 orang anggota keluarga dimana hanya satu orang saja yang bisa bekerja. Di awal kerja, dia diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan di pabriknya. Namun ternyata, keikutsertaannya tersebut berdampak pada terhapusnya yang bersangkutan dari DTKS. Padahal 1 orang ini mesti menghidupi ketujuh anggota keluarganya dengan gaji di bawah UMR. Ironisnya lagi, baru dua bulan dia bekerja, ternyata

Sebaiknya perlu ada pengecekan langsung di lapangan oleh SDM PKH agar bisa memperoleh fakta yang objektif sehingga temuan-temuan sebagaimana saya sebutkan tadi tidak lagi terulang di kemudian hari.

H. WISNU WIJAYA, SE, MM.

Anggota Komisi VIII DPR RI

dia kena PHK karena pabriknya gulung tikar dan tidak lagi bisa menerima bansos,” jelas Wisnu saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, Selasa (07/11).

Di lain kasus, Wisnu mengungkapkan bahwa ada juga salah satu KPM BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang namanya dihapus oleh sistem lantaran dinilai jarang menggunakan akses JKN.

“Yang bersangkutan adalah orang kurang mampu, KPM PKH. Ditambah, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, dia memang ketika sakit, lebih sering menggunakan obat warung. Namun dalam satu kesempatan, dia mengalami kondisi yang mesti dibawa ke Puskesmas. Akan tetapi, setiba disana yang bersangkutan justru tidak bisa mengakses layanan gratis sebagaimana

hak penerima BPJS Kesehatan PBI karena namanya tidak lagi tercatat di sistem,” terang Wisnu.

Merespons dua kasus di atas, legislator Fraksi PKS ini menekankan agar Kementerian Sosial bisa melakukan verifikasi dan validasi lebih teliti sebelum menghapus nama seseorang dari DTKS.

“Saya meminta agar proses verivali ini tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan pola atau algoritma di dalam sistem. Sebelum dihapus dari DTKS, sebaiknya perlu ada pengecekan langsung di lapangan oleh SDM PKH agar bisa memperoleh fakta yang objektif sehingga temuan-temuan sebagaimana saya sebutkan tadi tidak lagi terulang di kemudian hari. Mohon agar resources yang ada ini bisa dioptimalkan,” ucap Wisnu.

Live
Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



BERSAMA ARI PUTRA UTAMA



Saksikan
Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB





Kasus Cacar Monyet di Indonesia Meningkat, Wakil Ketua FPKS Minta Vaksinasi Diperluas

Jakarta (26/10) — Meningkatnya kasus penyakit cacar monyet (Monkeypox) menjadi 10 kasus di Indonesia per 24 Oktober 2023 harus dijawab dengan perluasan kebijakan vaksinasi kepada mereka yang berisiko tinggi.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis, 26 Oktober 2023.

"Ditemukannya 10 pasien cacar monyet di Jakarta harus ditindaklanjuti dengan kebijakan perluasan vaksinasi

Kemenkes harus menjadikan daerah seputar Jakarta sebagai prioritas surveilans dan vaksinasi agar penyakit tersebut bisa dilokalisir. Daerah-daerah tersebut memiliki jarak dan akses yang berdekatan dengan Jakarta. Mobilitas penduduk antar daerah tersebut juga terbilang tinggi,"

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

hingga ke wilayah sekitarnya seperti Banten dan Jawa Barat, terutama kepada mereka yang berisiko tinggi" kata Netty.

Diketahui, penyakit cacar monyet memiliki gejala sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri otot dan munculnya lesi cacar berupa benjolan berisi air atau nanah di seluruh tubuh.

Kemenkes, kata Wakil Ketua FPKS DPR RI ini, harus menjadikan daerah seputar Jakarta sebagai prioritas surveilans dan vaksinasi agar penyakit tersebut bisa dilokalisir.

"Daerah-daerah tersebut memiliki jarak dan akses yang berdekatan dengan Jakarta. Mobilitas penduduk antar

daerah tersebut juga terbilang tinggi," tambahnya.

Netty juga meminta Kemenkes agar mengencankan sosialisasi kepada mereka yang disebut sebagai orang yang berisiko tinggi terkena monkeypox, seperti pelaku hubungan biseksual.

"Sebagian besar pasien tersebut adalah orang dengan orientasi seksual sesama jenis dan orang dengan infeksi HIV/AIDS," katanya.

Menurut Netty, masyarakat harus mendapatkan edukasi seputar penyakit ini dan bahaya melakukan hubungan seksual berisiko serta cara menjauhi perbuatan yang bisa membuat tertular monkeypox.



Aleg PKS Tegas Tagih Janji Santunan Pemerintah untuk Korban GGAPA

Jakarta (29/10) — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati dengan tegas mendesak pemerintah segera memberikan santunan kepada anak-anak dan keluarga korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA).

Janji pemerintah yang akan memberikan santunan kepada 326 korban GGAPA baik yang rawat jalan maupun meninggal dunia masih belum kunjung diberikan. Padahal, keluarga-keluarga ini harus kehilangan anak-anak yang dikasihani dan harus berjuang merawat hingga kini akibat kelalaian sejumlah

pihak.

"Jika atas nama kemanusiaan seharusnya bisa dipercepat, tanpa harus menunggu proses birokrasi yang terlalu lama. Janji harus segera ditepati karena ini menyangkut nyawa anak-anak kita dan kesehatan generasi penerus. Saya sebagai seorang ibu merasakan bagaimana kehilangan serta yang kini tengah berjuang terus merawat sang buah hati," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Ahad (29/10).

Palagi menurut laporan, anak-anak yang kini terus mendapatkan perawatan keluar biaya mandiri yang tidak sedikit. Meskipun pengobatan ditanggung BPJS, namun ada kebutuhan lain yang tidak ditanggung BPJS dan jumlahnya tidak sedikit.

"Anak-anak yang masih dirawat banyak yang berjuang harus memakai selang untuk makan, harus rutin cuci

"326 korban ini bukan deretan statistik, namun ada sosok ayah ibu dan keluarga yang kehilangan disana. Ada ayah ibu yang masih terus berjuang mencari pengobatan terbaik untuk perawatan anaknya hingga kini. Inilah saatnya pemerintah hadir,"

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

darah beberapa kali sepekan, ada yang orang tuanya harus meninggalkan pekerjaan untuk mendampingi pengobatan anak. Ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Jadi tolong segera direalisasikan," terang Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini.

Anggota Fraksi PKS DPR RI ini meneruskan, kesehatan adalah hak asasi yang wajib dijamin oleh negara untuk masyarakat. Terlebih lagi, sudah berkali-kali janji pemberian santunan untuk korban GGAPA disampaikan oleh pemerintah.

"326 korban ini bukan deretan statistik, namun ada sosok ayah ibu dan keluarga yang kehilangan disana. Ada ayah ibu yang masih terus berjuang mencari pengobatan terbaik untuk perawatan anaknya hingga kini. Inilah saatnya pemerintah hadir," tegas Kurniasih.



Piala Dunia U-17 Tinggal Menghitung Hari, Politikus PKS Ingatkan Soal Pelatihan Khusus Pengamanan Sepak Bola

Jakarta (31/10) -- Menjelang perhelatan Piala U-17 yang digelar di 4 kota di Indonesia, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, mengingatkan pentingnya pelatihan khusus pengamanan sepak bola.

"Terkait pengamanan, pengamanan sepak bola itu harus di-training secara khusus," kata Ledia, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita RMOJLabar, Senin (30/10).

Menurut pengalamannya, pengamanan sepak bola yang ada di luar negeri itu berlapis. Di Turki, misalnya, ada polisi antihuru-hara yang akan mengawasi dengan ketat. Selain itu, ada pula polisi khusus yang mengawasi terkait olahraga, hingga komunitas sosial.

Polisi khusus tersebut, sebut Ledia, nantinya akan mengamankan jalannya pertandingan. Selama pertandingan berjalan, mereka duduk di kursi menghadap penonton.

"Sehingga mereka sudah diatur sedemikian rupa, mereka duduk itu dikasih kursi, pakaiannya sipil, tapi menghadap penonton dan tidak ada yang menengok ke belakang, dan tidak ada yang main HP, jadi disiplin," paparnya.

Menurut Ledia, pelatihan petugas keamanan sepak bola di Indonesia harus dibedakan dengan petugas keamanan

demo dan kerusuhan. Dengan adanya pelatihan khusus, diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya insiden buruk, seperti peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.

Ledia pun berharap, ajang Piala Dunia U-17 menjadi momentum untuk melihat pertandingan yang baik.

"Pertandingan yang baik jangan diganggu oleh nonteknisnya, misalnya oleh keberadaan kita yang tidak benar, jadi ini kesempatan yang bisa kita usahakan," ujarnya.

Untuk itu, agar tercipta

pertandingan yang baik, Ledia juga mengingatkan para penonton atau supporter untuk menjaga emosi.

"Jadi jangan melakukan yang pengrusakan, jangan mencederai orang lain, jangan mudah emosi, nonton jangan baperan, terus juga isi perut yang baik karena nanti kalau lapar biasanya tambah ribut, dan enggak usah terlalu emosi," pesannya.

Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar di empat stadion pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Empat stadion itu adalah Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara; Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung; Stadion Manahan, Solo; dan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Pelatihan petugas keamanan sepak bola di Indonesia harus dibedakan dengan petugas keamanan demo dan kerusuhan.

Dengan adanya pelatihan khusus, diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya insiden buruk, seperti peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.

**Hj. LEDIA HANIFA
A, S.Si., M.Psi.T**
Anggota Komisi X DPR RI

Pelemahan Rupiah Hantam Masyarakat Kelas Bawah

Aleg PKS: Pemerintah Lebih Berpihak pada Konglomerat!

Jakarta (03/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayatullah meminta Pemerintah mengantisipasi pelemahan rupiah dengan strategi yang komprehensif dan fokus kepada UMKM.

Hidayatullah, yang juga merupakan anggota Komisi XI, dalam talk show acara PKS Legislative Corner bertajuk 'Rupiah Melemah, Ekonomi Memburuk' yang ditayangkan Youtube PKS TV RI mengungkapkan keprihatinannya terhadap pelemahan nilai mata uang rupiah, yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat kelas bawah.

"Saya pribadi prihatin dengan nilai rupiah yang melemah ini karena dapat menghantam masyarakat kelas bawah," ungkap Hidayatullah.

Hidayatullah menjelaskan bahwa salah satu dampak dari pelemahan rupiah adalah kenaikan harga kebutuhan pokok di Indonesia akibat impor dari luar negeri.

"Memang itu masalah utama, kita tidak mempersiapkan kemandirian ekonomi kita



di kebutuhan dasar, kalau beras impor, jagung impor, kedelai impor, kita bayar dengan dolar, ketika dolar menguat maka harga di Indonesia akan naik bagi para pedagang tempe, pengrajin tempe, dan masyarakat luas yang mengonsumsi nasi akan mengeluh," tambahnya.

Hidayatullah juga menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat kelas bawah, terutama UMKM. Ia menekankan bahwa fokus pada UMKM sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Masyarakat kita ini kan

masyarakat petarung, dari dulu kerja di masa krisis ekonomi mereka bisa tetap survive. Yang lemah daya tahanya justru masyarakat kelas atas. Pemerintah seharusnya memberikan suasana membangun usaha yang kondusif sehingga mereka bisa bergerak dengan leluasa, misalnya masalah bunga," ungkapnya.

Kelas atas, imbuh Hidayatullah, memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan kelas bawah. Jadi, UMKM memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari para konglomerat.

"Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada kelas atas, padahal jika fokus pada UMKM maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat karena UMKM lebih banyak menghabiskan uang pada kegiatan konsumsi," paparnya.

Hidayatullah juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dan fokus pada sektor riil.

"Kita terus mengingatkan karena ini tidak bisa diselesaikan di sektor keuangan saja. Memang ini masalah keuangan



"Kita terus mengingatkan karena ini tidak bisa diselesaikan di sektor keuangan saja. Memang ini masalah keuangan tapi dia tidak bisa diselesaikan dari sisi keuangan saja,"

H. HIDAYATULLAH, S.E

Anggota Komisi XI DPR RI

tapi dia tidak bisa diselesaikan dari sisi keuangan saja," tuturnya.

Pemerintah, kata Hidayatullah, secara keseluruhan harus menguatkan sektor riilnya, kemandirian pangan, papan, dan sandang.

"Fraksi PKS disamping komunikasi bersama kawan-kawan di Komisi XI, juga menyampaikan hal ini kepada kawan-kawan yang bekerja di

sektor riil yang bermitra dengan Kementerian Pertanian dan Perdagangan. Karena ini tidak bisa diatasi hanya dari satu sisi saja, dan memang salah satu pilihan konsekuensinya adalah berpikir tentang perubahan sistem agar kita memiliki kemampuan yang kuat untuk mengantisipasi setiap perubahan terhadap nilai mata uang," pungkasnya.



Indonesia Masuki Periode Pelambatan Ekonomi, Aleg PKS: Peringatan Serius Pemerintah!

Jakarta (08/11) -- Badan Pusat Statistik (BPS) baru baru ini mengungkapkan dalam laporannya bahwa, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 4,94 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal III-2023.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyebut angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,73% dan dibandingkan kuartal sebelumnya 5,17% (yoy).

"Realisasi pertumbuhan ekonomi ini mengakhiri tren pertumbuhan di atas 5 persen selama 7 kuartal terakhir. Artinya Indonesia mulai memasuki periode perlambatan ekonomi yang cukup dalam," Demikian disampaikan Ketua Bidang Ekuin di DPP PKS ini, kepada sejumlah media nasional, Senin, (07/11/2023), di Gedung Parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Anis yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR RI, mengungkapkan bahwa setelah menikmati masa bukan madu, wind fall sejumlah komoditas unggulan nasional dalam beberapa waktu terakhir, harga komoditas utama Indonesia tersebut mulai mengalami penurunan harga secara perlahan, diantaranya seperti: minyak sawit, batu bara dan nikel.

"Pelemahan ini bisa berdampak besar mulai dari pertumbuhan ekonomi,

pendapatan negara, ekspor, hingga kemampuan daya beli masyarakat," ujarnya.

Lebih jauh Anis yang juga legislator dari Fraksi PKS tersebut, meyakinkan bahwa, pelemahan harga komoditas utama Indonesia, memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi perdagangan internasional Indonesia. Dalam laporan BPS tersebut, tercatat kinerja ekspor yang memiliki distribusi sebesar 21,6 persen turun 4,26 persen dan impor yang memiliki distribusi negatif 19,57 persen turun 6,18 persen.

"Terkoreksinya sumber pertumbuhan net ekspor selaras dengan kinerja

perdagangan nasional yang melemah. Indonesia kembali memasuki jalur lambat pertumbuhan ekonomi," ungkap Ketua DPP PKS ini.

Anis menambahkan, melambatnya pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2023, menjadi signal tanda bahaya bahwa Indonesia masuk dalam perlambatan ekonomi.

"Kita belum bisa lepas dari stagnasi pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5 persen, sekarang turun menjadi 4,94 persen," ungkapnya.

Upaya Indonesia, imbuh Anis, untuk bisa keluar dari stagnasi pertumbuhan 5 persen belum cukup kuat.

"Kondisi ini tentu akan menjadikan langkah Indonesia untuk mengakhiri tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, sebagaimana target dalam APBN 2023, akan menjadi langkah yang sangat sulit," tutup Anis.

“Realisasi pertumbuhan ekonomi ini mengakhiri tren pertumbuhan di atas 5 persen selama 7 kuartal terakhir. Artinya Indonesia mulai memasuki periode perlambatan ekonomi yang cukup dalam,”

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I



t.me/fraksipks

Follow Channel Telegram Fraksi PKS DPR RI



SCAN QR





Bersama Warga Manggamat Aceh Selatan, Rafly Kande Suarakan Tolak Mafia Tambang

Aceh (28/10) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Rafly Kande dan warga Manggamat, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh mendeklarasikan tolak mafia tambang di daerah yang terkenal kaya akan emas dan mineral itu.

Rafly dalam kunjungannya ke Desa Manggamat itu, menilai ada persoalan yang menarik dan menyita perhatian sejumlah pihak di Aceh Selatan.

Salah satunya adalah aktivitas pertambangan di Aceh Selatan yang berdampak pada lingkungan dan keresahan

“Mafia tambang adalah musuh masyarakat, mereka hadir untuk mengeruk hasil alam di Aceh Selatan dan meninggalkan alam yang rusak dan berbahaya bagi masyarakat, kita semua harus berpartisipasi untuk menolak mafia-mafia tambang.”

RAFLY KANDE

Anggota Komisi VI DPR RI

masyarakat di Kecamatan Kluet Tengah.

"Ini adalah bukti bahwa sektor tambang tidak dikelola dengan baik, sehingga memunculkan persoalan di masyarakat dan dapat menyebabkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat," ucap Rafly usai berdialog dan menyerap aspirasi dari masyarakat Manggamat, Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (25/10/2023).

Menurutnya, selama ini aktivitas pertambangan di Aceh Selatan kerap melahirkan berbagai masalah baik dengan masyarakat maupun pemerintah.

Hal tersebut disebabkan tidak adanya komitmen dan ketegasan dari pemerintah untuk mengatur persoalan pertambangan sehingga memunculkan praktik mafia

tambang.

"Mafia tambang adalah musuh masyarakat, mereka hadir untuk mengeruk hasil alam di Aceh Selatan dan meninggalkan alam yang rusak dan berbahaya bagi masyarakat, kita semua harus berpartisipasi untuk menolak mafia-mafia tambang," ulasnya.

Politisi Fraksi PKS ini berharap nantinya di Aceh segera terbentuk regulasi Badan Pertambangan Aceh, sehingga kekayaan mineral di Aceh dapat terjaga dan melahirkan manfaat bagi masyarakat Aceh.

"Kami berkomitmen menolak mafia tambang di Aceh khususnya Aceh Selatan, untuk itu kami terus memperjuangkan agar terbentuknya regulasi tentang badan pertambangan Aceh," harap Legislator Dapil Aceh I ini.



Wakil Ketua BKSAP FPKS Bela Palestina di Sidang Parlemen Dunia

Angola (26/10) -- Hingga hari ke-19, belum tampak tanda-tanda peperangan di Palestina berakhir. Hal ini menjadi perhatian dunia internasional.

Salah satunya pada Sidang IPU (Inter Parliamentary Union), yaitu sidang tahunan Parlemen Dunia ke-147 di Luanda, Angola, 23-27 Oktober 2023. Sidang IPU ini diikuti lebih 120 negara.

Sukamta, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai

delegasi dari Indonesia, menyampaikan di sidang IPU, Angola pada (24/10/2023).

"Kami menyaksikan di Palestina telah terjadi kejahatan perang terhadap kemanusiaan, pada serangan militer yang membabi buta khususnya di Gaza, telah membunuh ribuan

warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak dan orang tua. Di samping serangan itu juga menghancurkan rumah-rumah, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, juga memutus jaringan listrik, akses air dan energi. Di sinilah pentingnya para anggota parlemen untuk sadar dengan kondisi di Palestina agar lebih objektif dan adil."

Anggota Komisi I DPR RI ini juga mengidentifikasi situasi global terkini, bahwa masih ada beberapa negara yang masih memiliki perilaku neo kolonial-

"Kami menyaksikan di Palestina telah terjadi kejahatan perang terhadap kemanusiaan, pada serangan militer yang membabi buta khususnya di Gaza, telah membunuh ribuan warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak dan orang tua. Di samping serangan itu juga menghancurkan rumah-rumah, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, juga memutus jaringan listrik, akses air dan energi.

H. SUKAMTA, Ph.D

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

isme dan melakukan pendudukan terhadap negara lain.

Tindakan dan perilaku ini mirip dengan masa perbudakan yang terjadi di Afrika, kolonialisme di Asia Afrika dan Amerika Latin. Sayang sekali mereka mendukung tanpa syarat, sanksi dan konsekuensi apapun dengan alasan Israel membela diri," tegas Anggota Komisi I DPR RI ini.

"Sudah sangat jelas siapa yang menduduki (okupasi) dan siapa yang terpaksa mengungsi, mereka (Palestina) juga punya hak yang sama untuk membela diri. Di sini saya menekankan bahwa pendudukan dan neo kolonialisme harus diberantas, karena ini melawan kemanusiaan, hak asasi dan seluruh makna keadilan, sebagaimana juga

ditegaskan dalam konstitusi Indonesia", imbuhnya tegas.

Sukamta yang berasal dari Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa pada sidang IPU tersebut, delegasi RI mengusulkan agar penghentian perang di Gaza, Palestina, masuk menjadi resolusi sidang, yaitu penghentian segera peperangan dan pembunuhan terhadap anak-anak dan wanita di Gaza.

"Usulan delegasi RI ini sebenarnya disetujui oleh Mayoritas parlemen dunia yang hadir, tapi karena hasil voting tidak mencapai 2/3 kuorum, maka resolusi tersebut tidak bisa diadopsi. Meskipun demikian, pihaknya tetap optimis : Nanti akan coba kita suarakan kembali," ujar legislator dari Yogyakarta ini.

Aleg PKS: Revisi UU ITE Penting bagi Kondisi Demokrasi Indonesia yang Baik dan Sehat di Masa Depan

Jakarta (07/11) — Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto mengatakan bila kita melihat proses atau alur dalam pembuatan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ini maka kita banyak terikat aturan karena Indonesia ini negara hukum dan berasaskan aturan yang berlaku.

Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam Diskusi 'Forum Legislatif' yang diselenggarakan Koordinatariat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tema 'Revisi UU ITE Cegah Kampanye Hitam Pemilu 2024', pada Selasa, (07/11) di Media Center, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Setidaknya kita memegang prinsip sila

Kemanusiaan yang adil dan beradab, karena setiap perilaku itu didasari pada ada yang baik. Sehingga ketika berbicara itu harus sesuai dengan etik yang ada di negara kita. Ini menjadi bagian penting dari ruh bangsa Indonesia", ungkap Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Hermanto menambahkan, nilai religius itu menjadi dasar bagi perilaku manusia di Indonesia. Konsep komunikasi dan etika ini harus dimiliki oleh setiap anak bangsa.

"Disini kemampuan anak bangsa untuk bisa menahan rasa amarah di dalam dirinya. Saya memprediksi menjelang pemilu ini sensitif masyarakat untuk komentar sangat tinggi. Karena keterlibatan anak bangsa dalam Pemilu itu melibatkan emosi. Nah ini yang kita konsen pada UU ITE," terang Hermanto.

Aturan yang kita miliki ini, imbuhnya, akan berpengaruh pada lingkungan baik di dalam rumah dan tetangga di luar rumah.

"Kita perlu membangun motivasi yang kuat untuk nilai etik, yang bila ada ketidaksukaan maka harus pandai menahan diri agar bisa menjaga NKRI ini secara utuh. Jangan sampai karena emosional, kita asal share berita-berita yang tidak benar. Sehingga revisi undang-undang ITE ini sangat urgent agar komunikasi itu bisa membangun Republik ini menjadi lebih baik," ujar Anggota Komisi IV ini.

Undang-undang ITE ini, lanjut Hermanto, bagi Fraksi PKS sebenarnya mendorong masyarakat untuk bebas dalam berbicara tetapi harus mengetahui apa yang dibicarakan.

"Sebenarnya yang perlu diatur bukan tindakan represif, agar masyarakat itu punya kemampuan menahan emosionalnya. Itu yang membuat pentingnya Undang-



"Disini kemampuan anak bangsa untuk bisa menahan rasa amarah di dalam dirinya. Saya memprediksi menjelang pemilu ini sensitif masyarakat untuk komentar sangat tinggi. Karena keterlibatan anak bangsa dalam Pemilu itu melibatkan emosi. Nah ini yang kita konsen pada UU ITE,"

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Badan Legislatif DPR RI

undang ini dipastikan menyinggung orang atau tidak, apa yang disampaikan benar atau tidak menabrak aturan yang berlaku atau tidak. Proses itu kita minta tanggapan publik, pakar, dan akan kita dalam

stakeholder agar rumusan dalam UU ITE ini agar bisa jadi sarana membangun demokrasi yang lebih baik dan sehat di masa mendatang," tutup Hermanto.



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri

Bertemu Komunitas Ojol, Diah Nurwitasari Dengarkan Keluhan Soal Tarif Sepihak Aplikasi Ojol

Soreang (26/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari, bersilaturahmi dengan Komunitas Ojeg Online (Ojol) di RM Saung Soreang Kabupaten Bandung.

Acara silaturahmi dan audiensi tersebut dihadiri tiga puluhan pengemudi Ojol yang merupakan perwakilan Ojol dari beberapa komunitas dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung.

Diah Nurwitasari yang datang ke tempat acara dengan memakai motor dari aplikasi Ojol mengapresiasi para pengemudi Ojol yang menyempatkan waktu untuk audiensi.

"Saya termasuk yang sering merasa terbantu dan tertolong dengan adanya para pengemudi Ojol. Terima kasih banyak bagi Akang/ Tete di tengah aktivitas yang mungkin lagi waktunya banyak orderan ngojog tapi bisa menyalurkan waktu untuk bersilaturahmi dan menyampaikan keluhan-keluhan dari para pengemudi Ojol demi keadaan yang lebih

baik di masa mendatang," pungkasnya.

Aleg perempuan asli Bandung ini menyapa dengan santun para Perwakilan Komunitas Mitra Ojol.

"Pada masa reses ini sudah menjadi tugas saya untuk membuka komunikasi dengan semua elemen masyarakat untuk mendengarkan berbagai masukan baik itu saran maupun keluhan tentang berbagai hal. Yang insya Allah akan saya suarakan pada rapat dan sidang di DPR RI nanti," Anggota Komisi VII DPR-RI ini menambahkan.

Pada sesi tanya jawab tampak beberapa audien antusias menyampaikan pertanyaan dan keluhan terkait aturan tarif sepihak dari aplikasi yang diduga tidak mengakomodatif bagi para mitra Ojol.

"Pihak aplikasi selama ini melakukan pemotongan persen ongkos yang tidak menentu, bonus dan poin pun tidak sebesar dulu. Hal ini tentu merugikan kami para mitra ojol." Ungkap Andika salah satu peserta yang hadir.

"Kami kasih 5 bintang buat Ibu Diah yang mau mendengar keluh kesah kami, kami lihat Ibu begitu santun dan sederhana bahkan datang ke tempat ini dibonceng oleh motor rekan kami," lanjut salah satu mitra ojol menambahkan.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi VII DPR-RI Diah Nurwitasari mencoba menawarkan solusi.

"Saya bersama para mitra Komisi VII sering mengadakan diklat-diklat kewirausahaan dan UMKM yang insya Allah dapat membantu menambah skill dan penghasilan masyarakat. Saya harap ke depannya Akang/ Tete mau jadi pesertanya sehingga insya Allah bisa menambah pintu rezeki di luar aktivitas ojol ini," ucap Diah, ahli desain pesawat terbang



"Saya bersama para mitra Komisi VII sering mengadakan diklat-diklat kewirausahaan dan UMKM yang insya Allah dapat membantu menambah skill dan penghasilan masyarakat. Saya harap ke depannya Akang/ Tete mau jadi pesertanya sehingga insya Allah bisa menambah pintu rezeki di luar aktivitas ojol ini,"

Dipl.Ing. Hj. **DAH NURWITASARI**, M. I. POL.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

lulusan Jerman ini.

Salah satu koordinator komunitas mitra ojol, Achmad Ilyas Prayogi terkesan dengan audiensi ini.

"Saya bersama rekan-rekan Ojol merasa dihargai dan bahagia bisa bertemu dengan

wakil rakyat secara langsung. Saya harap ini bukan yang terakhir dan kita bisa terus berkolaborasi untuk kebaikan masyarakat. Insya Allah kami siap mendukung Ibu Diah untuk maju dalam pemilu 2024 yang akan datang," pungkasnya mantap.

Andi Akmal Dorong Peningkatan Kapasitas Petani Hortikultura di Kabupaten Bone

Kabupaten Bone (01/11) — Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS Dapil Sulsel II, Andi Akmal Pasluddin, mengucapkan selamat atas pelantikan kembali Andi Amran Sulaiman (AAS) sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pelantikan Andi Amran Sulaiman ini berlangsung di Istana Negara pada Rabu, 25 Oktober 2023.

“Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, saya merasa memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pertanian dan petani di wilayah saya. Saya sangat senang bisa berada di tengah-tengah Anda semua hari ini, dan saya ingin menyatakan bahwa pertanian adalah salah satu fondasi utama ekonomi kita, dan petani adalah pilar terkuat di sektor ini,” kata Politisi PKS ini.

Pria kelahiran BONE ini, yang dulu juga bermitra dengan Menteri Pertanian yang baru saja dilantik, yakni ketika

kabinet Indonesia Maju Jilid I dimana presiden Jokowi bersama wapres Jusuf Kalla menyambut dengan gembira amanah yang diberikan kepada Dr. Andi Amran Sulaiman. Dalam pernyataannya, Politisi PKS ini menyampaikan pesan selamat dan harapannya untuk masa jabatan AAS setahun di ujung pemerintahan Indonesia Maju Jilid II.

Akmal mengatakan, Hortikultura, atau budidaya sayuran dan buah-buahan, adalah salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam

memenuhi kebutuhan akan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagai negara dengan populasi besar, permintaan akan produk hortikultura terus meningkat, dan menurutnya, pemerintah harus siap menghadapinya.

“Melalui program seperti Bimbingan Teknis ini, kami ingin membantu petani dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka. Kita semua tahu bahwa pendidikan dan pelatihan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pertanian modern,” ungkapnya.

Andi Akmal Pasluddin juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengembangan sektor pertanian. Ia meyakini bahwa pengalaman dan pengetahuan menteri yang berpengalaman dalam bidang pertanian akan memudahkan komunikasi dan kerja sama antara kedua tingkatan pemerintahan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia.

“Kehadiran Menteri Pertanian yang berpengalaman ini, mesti singkat waktunya, harus menjadi tumpuan kesejahteraan Petani. Jangan ada lagi isu korupsi, jangan lagi ada isu tidak sinkronnya koordinasi antar lembaga. Kita



“Melalui program seperti Bimbingan Teknis ini, kami ingin membantu petani dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka.

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

perkuat sektor pertanian mulai dari lembaga besar pemerintahan hingga kelompok-kelompok kecil petani yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kritis Anggota Banggar DPR ini.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir di acara ini, kepada para petani yang telah berjuang keras, dan kepada

semua pihak yang telah mendukung upaya kami. Bersama-sama, kita dapat mencapai perubahan positif dalam sektor pertanian, menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat hortikultura yang berkelanjutan,” tutup Andi Akmal Pasluddin.



Hadapi Pemilu 2024, Rafly Kande Safari Perkuat Caleg PKS di Aceh

Banda Aceh (31/10) — Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan beragam strategi pemenangan, diantaranya seperti yang dilakukan politisi PKS asal Aceh, Rafly Kande, yang kembali maju sebagai Calon DPR-RI PKS Dapil 1 Aceh.

Kader Partai yang konsisten mengawasi dan mengkritisi kebijakan Pemerintah agar pro terhadap kepentingan Rakyat melalui perannya sebagai anggota Komisi VI DPR-RI tersebut melakukan kunjungan langsung menemui jajaran calon legislatif PKS di semua tingkat baik calon Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota

"PKS selama periode ini konsisten berposisi menjadi fraksi terdepan membela kemaslahatan umat, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dan tidak berpihak kepada rakyat"

RAFLY KANDE

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Nangroe Aceh Darussalam I

(DPRK) maupun Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 1.

"PKS selama periode ini konsisten berposisi menjadi fraksi terdepan membela kemaslahatan umat, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dan tidak berpihak kepada rakyat" Ujarnya, Jumat (27/10/2023) di Tapaktuan, Aceh Selatan.

"Sinergi antar kader PKS adalah keniscayaan demi penguatan kader-kader yang akan maju pada pemilu legislatif 2024 mendatang. Hampir seminggu ini kita sudah menyusuri wilayah barat selatan Aceh berkoordinasi di DPD PKS Aceh Singkil, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Barat Daya, Aceh Barat. Sebelumnya kita juga sudah lakukan penguatan di Pidie, Aceh Besar, dan Banda Aceh." Pungkasnya.

Caleg DPRA PKS Dapil Aceh 9 asal Aceh Singkil,

Wanhar Lingga menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengunjungi masyarakat Kota Subulussalam dan Aceh Singkil.

"Kita harap semua sinergi bersama PKS melakukan sekecil-kecilnya perbaikan dimulai dari tindakan sederhana kita memilih kader PKS. Politik hari ini harus berdasarkan gagasan, bukan hanya sekedar bercerita proyek yang ujung-ujungnya tak jelas kebermanfaatannya," tandasnya.

Perjalanan safari Rafly Kande menyusuri wilayah barat selatan Provinsi Aceh hampir dua minggu berlangsung 20 - 30 Oktober 2023, telah melakukan beragam kegiatan berbasis sosial dan kemasyarakatan disamping membangun pemahaman dan gagasan politik yang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat Aceh.



Wisnu Wijaya Tawarkan Coaching Bisnis dan Program Tali Asih bagi SDM dan KPM PKH

Semarang (06/11) -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya menawarkan program coaching bisnis bagi SDM PKH dan penerima manfaat PKH di dapil Jateng 1 yang meliputi Kota dan Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.

Program tersebut berupa pelatihan wirusaha bagi pemula yang berminat terjun ke dunia bisnis dengan dimentori langsung oleh praktisi wirusaha.

"Program ini berangkat dari usaha kami untuk menjawab aspirasi para SDM PKH maupun KPM PKH yang ingin memperoleh tambahan penghasilan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kami tawarkan secara gratis kepada seluruh unsur PKH dengan harapan agar para SDM PKH tidak melulu bergantung pada wacana alih status jadi PPPK, sementara bagi KPM PKH agar lekas graduasi. Ini solusi yang bisa kami tawarkan dan bisa dieksekusi dalam waktu dekat," jelas Wisnu, Ahad (05/11/2023).

Anggota DPR yang juga pengusaha produk herbal ini mengatakan, pihaknya telah menyiapkan segala infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang program coaching bisnis tersebut seperti modul, modal barang, mentor, hingga akses ke bantuan modal dan pasar bagi para peserta.

"Pengalaman kami menciptakan lebih dari 50 ribu entrepreneur se-Jawa Tengah menjadi best practice yang mendorong kami untuk meluaskan penerima manfaat melalui program pelatihan dan pemberdayaan yang menasar secara spesifik bagi warga di dapil kami," terangnya.

Selain menawarkan pelatihan bisnis, Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga menawarkan program tali asih berupa santunan kedudukan bagi SDM PKH maupun KPM PKH. Nilai tali asih tersebut mencapai Rp 5 juta bagi setiap penerima manfaat yang meninggal akibat kecelakaan.

"Kami merasa prihatin dan sejujurnya khawatir dengan tingginya risiko kerja yang dibebankan pada SDM PKH. Dengan beban dan risiko kerja yang tinggi tersebut, sudah seharusnya mereka dan keluarganya terlindungi selama bekerja maupun ketika sudah purna tugas akibat hal-hal yang tidak diharapkan, dalam hal ini kematian," kata Wisnu.

Secara prinsip, lanjut Wisnu, kami tidak berharap hal buruk terjadi. Namun demikian, kita perlu mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang bisa menimpa SDM PKH maupun keluarga yang ditinggalkan.

"Pertanyaannya adalah bagaimana posisi kita sebagai wakil rakyat ketika momen duka itu terjadi? Saya memutuskan untuk bersikap. Karena itu saya berharap dengan terdapatnya mereka di program tali asih ini, ada sesuatu yang bisa kami berikan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan," pungkasnya.

"Pengalaman kami menciptakan lebih dari 50 ribu entrepreneur se-Jawa Tengah menjadi best practice yang mendorong kami untuk meluaskan penerima manfaat melalui program pelatihan dan pemberdayaan yang menasar secara spesifik bagi warga di dapil kami,"

H. WISNU WIJAYA, SE, MM.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I



Kunjungi Mentawai, Hermanto Fasilitas Keluarga Nelayan dengan Bimtek Pengolahan Ikan

Mentawai (01/11) --- Anggota DPR RI Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya ke daerah pemilihan menyempatkan diri menyebrang lautan dengan menggunakan kapal Ferry untuk menemui keluarga nelayan di Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Disana ia memfasilitasi keluarga nelayan dengan bimbingan teknis pengolahan ikan.

"Selama ini nelayan di Sikakap menjual ikan dalam bentuk segar. Ke Depan, sudah saatnya menjual ikan dalam bentuk olahan sehingga lebih bisa tahan lama dan nilai jualnya lebih tinggi", ujar Hermanto dalam paparannya

"Selama ini nelayan di Sikakap menjual ikan dalam bentuk segar. Ke Depan, sudah saatnya menjual ikan dalam bentuk olahan sehingga lebih bisa tahan lama dan nilai jualnya lebih tinggi",

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Keluarganya di Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, Minggu (29/10/2023).

Melalui Bimtek ini, lanjut Hermanto, keluarga nelayan akan mendapat pengetahuan dan keterampilan mengolah ikan khususnya membuat abon ikan.

"Setelah bimtek ini para keluarga nelayan di Sikakap tentu akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yaitu membuat abon ikan", tutur legislator dari FPKS DPR RI ini.

Hermanto berharap pengetahuan dan keterampilan baru tersebut berujung pada sikap baru.

"Bimtek ini berhasil bila para keluarga nelayan bersedia

merubah sikap dari cara lama ke cara baru", ucapnya.

"Sikap lama menjual ikan seluruhnya dalam bentuk segar. Sikap baru, mengolah dulu sebagian ikan segar menjadi abon ikan guna meningkatkan nilai tambah lalu dijual", pungkas legislator dari Komisi IV DPR RI ini.

Pembuatan abon ikan dipandu oleh instruktur Sari Deswati dan asisten instruktur Muniarti. Keduanya adalah pelaku UMKM pengolahan ikan setempat. Hadir juga dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Bayu serta 9 tokoh masyarakat: Hamdanus, Muhammad Marzuki, Iswandi, Hendrik Nasrani, Richard, Dini Islamiyatul Zahro, Setiawelli, Hendra Karnadi dan Novianti.



Iskan Qolba Lubis Kunjungi Kabupaten Padang Lawas Sosialisasikan Haji

Kabupaten Padang Lawas (07/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mengunjungi Kabupaten Padang Lawas yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II

untuk melakukan Sosialisasi Haji, bertempat di Aula Hotel Al-Marwah Jalan Ki Hajar Dewantara Lingkungan II Padang Luar Sibuhuan, Minggu (05/11/2023).

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kementerian

"Saya termasuk yang memperjuangkan penurunan ongkos haji pada tahun 2023 dan bersama PKS juga akan memperjuangkan agar tidak ada penambahan ongkos haji bagi jamaah tahun 2024 nanti,"

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Agama (Kemenag) Padang Lawas Abdul Manan, Umar Hasibuan, para Kepala Seksi dan Kepala KUA di jajarannya, para Pengurus PKS Padang dan peserta sosialisasi dari 3 Kecamatan di Padang Lawas.

Dalam arahnya, Iskan Qolba Lubis yang merupakan Anggota DPR RI yang membidangi komisi VIII mengatakan, saat ini permasalahan Haji menjadi bahan yang cukup serius di DPR RI.

"Saya termasuk yang memperjuangkan penurunan ongkos haji pada tahun 2023 dan bersama PKS juga akan memperjuangkan agar tidak ada penambahan ongkos haji bagi jamaah tahun 2024 nanti," tegasnya.

Iskan Qolba menambahkan, PKS tetap memperjuangkan agar fasilitas

jamaah haji di tahun 2024 akan ditingkatkan, mulai dari konsumsi makan 2 hari sebelum dan sesudah armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina).

"Insya Allah, saya selaku pengawas pelaksanaan haji tahun 2024, juga akan hadir bersama para jamaah semuanya di tanah suci nanti nya, catat no HP saya, Laporkan setiap kekurangan atau pun yang menjadi masalah nantinya bagi jamaah selama disana," Pesannya pada seluruh yang hadir.

"Semoga persiapan yang kita lakukan saat ini, mulai dari manasik, menjaga kesehatan dan menabung untuk pelunasan nanti sudah lah harus kita persiapkan dari saat ini, insya Allah kita semua akan menjadi Haji yang mabrur dan mabrurah," ucapnya.



8 TIPS

MENJAGA KESEHATAN TUBUH DARI POLUSI UDARA

Indeks Kualitas Udara (AQI) mengungkapkan bahwa beberapa kota di Indonesia, Jakarta, telah menjadi yang ketiga terburuk di dunia. Hal ini berdampak buruk pada kesehatan manusia, sehingga penting untuk memahami cara melindungi tubuh dari polusi udara.



Gunakan **Masker** saat berada di luar rumah



Tanam lebih banyak **Tumbuhan Hijau** di sekitar rumah



Gunakan **Transportasi Umum** seperti MRT, TransJakarta, dan KRL



Hindari daerah polusi tinggi



Kurangi penggunaan kendaraan bermotor



Makan sayur, protein, dan **Minum** minimal 2 liter air per hari



Olahraga minimal dua hari sekali



Jaga kebersihan udara dalam ruangan





Aleg PKS Terima Aspirasi Aliansi Masyarakat Muslim Tasik Utara Dukung Kemerdekaan Palestina

Tasikmalaya (26/10) — Anggota Legislatif DPR RI Toriq Hidayat takjub dengan semangat umat Islam dari berbagai elemen masyarakat yang berkumpul.

Ribuan orang tumpah ruah melakukan aksi solidaritas untuk Palestina di Alun-Alun Masjid Besar Ciawi Kabupaten

Tasikmalaya Jumat (20/10/2023).

Peserta aksi solidaritas untuk Palestina itu terdiri dari

beberapa organisasi diantaranya, MUI, DMI, NU, Muhammadiyah, PERSIS, PUI, FPI, FSM Pagerageung, PA212, IKADI, BKMM, SALIMAH, BSTU, HIPAS, FORSSI, Pemuda Pancasila, Gibas, Fagar, BBC, Street Bulls, HILMI, Karang Taruna, Jamaah Tabligh T-9, Bikers Subuhan dan lainnya yang ada di Tasik utara.

“Yang sangat menarik adalah terpantiknya giroh keislaman masyarakat dari 5 Kecamatan Tasik utara. Bangkitnya semangat ukhuwwah dan persatuan antar semua ormas keagamaan dan ormas lainnya, semua aparat dan semua elemen masyarakat untuk membela dan mendukung perjuangan bangsa Palestina,”

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

“Yang sangat menarik adalah terpantiknya giroh keislaman masyarakat dari 5 Kecamatan Tasik utara. Bangkitnya semangat ukhuwwah dan persatuan antar semua ormas keagamaan dan ormas lainnya, semua aparat dan semua elemen masyarakat untuk membela dan mendukung perjuangan bangsa Palestina,” ungkap Toriq.

Aksi Solidaritas yang dilakukan Aliansi Masyarakat Muslim Tasik Utara, tambah Aleg Pusat asal Fraksi PKS, dengan cara berdo'a bersama dan menggalang dana untuk disalurkan langsung ke Palestina, penyampaian orasi para tokoh Tasik Utara secara bergiliran. Serta menyerahkan surat pernyataan sikap untuk DPR RI agar disampaikan ke Pemerintah.

“Aliansi Masyarakat Muslim Tasik Utara memberikan surat pernyataan sikap kepada Kami selaku Anggota DPR RI untuk disampaikan kepada Pemerintah. Agar Indonesia segera ikut andil atas situasi konflik Palestina dan Israel yang kembali terjadi. Mendesak agar perang dan tindak kekerasan yang terhadap Rakyat Palestina segera dihentikan,” jelas Toriq.

Menurutnya Palestina adalah bagian dari denyut nadi umat Islam. Palestina merupakan tanah suci yang dipilih oleh Allah SWT. Tempat Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW yaitu dari Masjidil Haram ke Masjid Al Aqsa. Sehingga saat ini muslim bisa menikmati salat. Selama Palestina belum merdeka dari penjajah Israel, maka perjuangan Rakyatnya tidak akan pernah berhenti.



Bertemu Konstituen, Nevi Zuairina Berpesan Pada Pelaku UMKM untuk Pengembangan Usaha

Bukittinggi (24/10) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, Dalam sebuah acara Pelatihan Peningkatan Sumberdaya Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

yang diselenggarakan di Grand Rocky Hotel, Bukittinggi, menyampaikan pesan dan komitmennya mengenai kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Nevi Zuairina memulai dengan menggarisbawahi pentingnya peran UMKM dalam perekonomian global. UMKM telah membuktikan diri sebagai tulang punggung perekonomian dunia, dan di Indonesia, mereka menjadi pondasi penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

"Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa kontribusi UMKM mencapai 99% dari seluruh unit usaha, mereka berkontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan mampu menyerap hingga 96,9% tenaga kerja," ungkapnya.

Namun, politisi PKS ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM, termasuk akses keuangan yang terbatas, permasalahan pemasaran dan promosi, infrastruktur dan

teknologi yang masih kurang, regulasi dan birokrasi yang kompleks, serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan.

"Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak terkait," jelas Nevi.

Nevi Zuairina kemudian menjelaskan berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung UMKM di Indonesia. Beberapa di antaranya termasuk pembangunan infrastruktur yang memadai, program pembiayaan seperti

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro, serta digitalisasi UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing.

Selain itu, legislator daerah pemilihan Sumatera Barat II ini juga mengungkapkan komitmen Pemerintah dalam mengkampanyekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Gerakan ini bertujuan untuk memajukan produk-produk lokal Indonesia dan meningkatkan kepercayaan diri bangsa terhadap potensi dan kualitas produk buatan dalam negeri.

"Melalui implementasi kebijakan-kebijakan yang telah digulirkan, diharapkan UMKM di Indonesia akan menjadi lebih kuat, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah," tutup Nevi Zuairina dalam sambutannya.

"Melalui implementasi kebijakan-kebijakan yang telah digulirkan, diharapkan UMKM di Indonesia akan menjadi lebih kuat, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah,"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

Bagikan Bantuan untuk Petani di Dapil, Rofik Dorong Masyarakat Optimalkan Penggunaan Gas

Kebumen (30/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto mendistribusikan bantuan Konverter Kit Pompa Air BBM ke BBG (Gas) kepada petani sasaran di Kabupaten Kebumen sebanyak 200 unit.

Pendistribusian tersebut dilakukan di Gudang Cadangan Pangan Kebumen bersama dengan calon penerima bantuan yang akan menerima Konkrit pompa air secara gratis ini pada Hari Jumat (27/10).

Rofik dalam sambutannya mengatakan program ini merupakan sinergi Komisi VII DPR RI bersama dengan mitra Kementerian ESDM untuk membantu para petani di daerah.

“Sudah hadir di depan bapak ibu semua, seperangkat pompa air untuk para petani, ini adalah sebuah program dari Kementerian ESDM bersinergi dengan Komisi VII DPR RI sebagai mitra kerjanya,” tutur Anggota DPR RI Komisi VII tersebut.

Rofik menjelaskan program ini merupakan bentuk

inisiasi pemerintah dalam mendorong penggunaan gas di masyarakat Indonesia, dimana migrasi ini diperlukan untuk mengurangi kebutuhan impor BBM dalam negeri, serta mengoptimalkan surplus gas yang ada di Indonesia saat ini.

“Asal muasal program ini adalah program pemerintah untuk mengajak masyarakat migrasi dari penggunaan bahan bakar minyak atau BBM ke gas, disebabkan karena Indonesia belasan tahun menjadi negara yang impor minyak, karena hasil eksplorasi minyak di Indonesia semakin tahun semakin berkurang. Walaupun Indonesia adalah negara penghasil minyak nomor 24 di dunia, tapi kebutuhan Indonesia dengan hasil yang didapatkan dari

tanah negeri ini masih kurang.”

“Kita butuhnya 1,4 juta barel per hari, tapi produksi kita hanya 600-800 ribu perhari, sehingga sisanya kita impor dan harga minyak negara tuh berubah-ubah,” jelas ALEG Fraksi PKS tersebut.

Maka dari itu, Rofik menerangkan perlunya migrasi penggunaan BBM ke BBG salah satunya dalam bentuk pompa air bagi para petani dimana sebelumnya masih banyak yang menggunakan BBM sebagai bahan bakarnya.

“Pemerintah melihat salah satu pengguna BBM yang bisa dirubah, bisa dimigrasi adalah petani, makanya pemerintah membuat program konversi bahan bakar minyak ke gas ini,” terang Politisi asli Purbalingga tersebut.

Rofik mengatakan 200 konkrit pompa air yang dibagikan tahun ini merupakan tahun ketiga dimana aspirasi DPR RI tersebut dapat disalurkan kepada petani Kebumen.

Selama tiga tahun tersebut, total sudah disalurkan



“Pemerintah melihat salah satu pengguna BBM yang bisa dirubah, bisa dimigrasi adalah petani, makanya pemerintah membuat program konversi bahan bakar minyak ke gas ini,”

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

1.015 konkrit pompa air kepada petani sasaran di Kebumen.

Hadir pada peresmian tersebut Kepala Dinas dan Pertanian Pangan Kebumen Teguh Yuliono, menyampaikan apresiasi atas sinergi wakil rakyat di DPR RI bersama mitra Kementerian ESDM dalam menyalurkan bantuan kepada petani Kebumen

“Kami berharap semoga kerjasama yang telah terjadi ini

bisa berlanjut, saling menguntungkan. Berkaitan dengan program-program lain yang masih ada dibawah Komisi VII bisa disampaikan ke Kebumen, kepada Kementerian ESDM apabila ada program lain kami siap menyambutnya. Kami sebagai pemerintah daerah Inyha Allah akan selalu aktif untuk membantu para petani kami,” tutur Teguh dalam sambutannya.



Anggota FPKS: Dorong Pertamina Geothermal Energy Kembangkan Diversifikasi Sumber Energi Bersih

Surabaya (24/10) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, mengatakan Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) memegang peran penting dalam menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan di Indonesia.

"Sebagai badan usaha milik negara yang bernaung di bawah Pertamina, PGE memiliki peran strategis dalam mendukung diversifikasi sumber energi dan keberlanjutannya di negara ini," ungkapnya.

Amin Ak menyoroti fokus perusahaan ini pada pengembangan, eksplorasi, dan produk energi panas bumi di dalam negeri.

Amin juga mencatat bahwa PGE memiliki kapasitas terpasang sebanyak 672 MW secara independen dan 1.205 MW melalui Joint Operation Contract (JOC) dari 15 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang terbagi menjadi 6 area operasi.

Selain itu, imbuhnya, PGE memiliki cakupan area operasi yang mencakup 13 wilayah kerja, termasuk Kamojang, Karaha, Lahendong, dan lainnya.

"Perusahaan ini juga memiliki portofolio proyek yang luas dan beragam, serta menggunakan teknologi canggih dan tim ahli untuk mengelola rantai produksi energi panas bumi dari eksplorasi hingga distribusi," ungkapnya.

PGE, lanjutnya, menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga penelitian, universitas, dan mitra industri, untuk mendorong inovasi dan pengembangan industri energi panas bumi yang lebih kuat.

"Selain itu, perusahaan ini berinvestasi dalam teknologi energi panas bumi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas," pungkasnya.

PGE juga, tambah Amin, aktif dalam memberikan program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan tenaga kerja terampil di bidang energi panas bumi.

"Perusahaan ini juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dengan melibatkan komunitas lokal, melestarikan lingkungan, dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab," ujar Amin.

Amin Ak menegaskan bahwa PGE memiliki sumber daya yang memadai untuk berperan penting dalam menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan di Indonesia.

"Selain memberikan pasokan energi bersih, PGE juga berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggantikan sumber energi konvensional," tegasnya.

Perusahaan ini berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi lintas sektor guna menjadi pemimpin dalam penyediaan energi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Indonesia.

"Perusahaan ini juga memiliki portofolio proyek yang luas dan beragam, serta menggunakan teknologi canggih dan tim ahli untuk mengelola rantai produksi energi panas bumi dari eksplorasi hingga distribusi,"

AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokratif Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



Nur Azizah Tamhid Edukasi Siswa SD Sakura Bekasi Terkait Fungsi DPR RI dan Kepemimpinan

Jakarta (31/10) -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nur Azizah Tamhid, menerima kunjungan dari Sekolah Dasar Shibghah Akhlak Al-Qur'an (SAKURA) Kota Bekasi di Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (31/10).

Dalam kunjungannya, selaku Kepala Sekolah SD Sakura Muthoharoh menyampaikan maksud dari kedatangannya yakni memberikan penjelasan dan pemahaman dasar kepada para siswa mengenai Fungsi DPR RI.

"Tujuan kami hadir berkunjung ke gedung ini dalam rangka belajar. Anak-anak kami kelas 6, salah satu materi yang kami coba alirkan adalah tentang kepemimpinan. Tentunya anggota DPR ini adalah para pemimpin di tingkat negara Indonesia. Selain itu juga tentang fungsi dan peran para anggota dewan sebagai wakil rakyat seperti apa. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat anak-anak kami." ujar Muthoharoh.

"Alhamdulillah teman-teman bisa sampai di tempat ini. Selamat datang di rumah wakil rakyat. Alhamdulillah kunjungan ini dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Masyaallah ini program yang cukup baik dan mudah-

perwakilan terbentuk sejak masa penjajahan Belanda hingga berbentuk DPR seperti sekarang.

"Kalau kita hidup tanpa aturan kira-kira nyaman tidak? Tidak nyaman ya pasti. Oleh karena itu menjadi penting adanya lembaga yang mengatur jalannya sebuah negara, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat." ucap Nur Azizah.

Nur Azizah juga memberi informasi terkait fungsi-fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan juga program-program yang telah dilakukan kepada masyarakat. Penjelasan beliau ditutup dengan memberikan sesi kuis berhadiah kepada para siswa peserta kunjungan.

Kunjungan ini ditutup dengan kegiatan foto bersama. Rombongan SD Shibghah Al-Qur'an kemudian melakukan tur keliling Gedung DPR serta Museum DPR RI.

mudahan kesempatan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan buat teman-teman semua." ujar Nur Azizah Tamhid dalam sambutannya kepada rombongan siswa SD Shibghah Akhlak Al-Qur'an.

Nur Azizah memberikan penjelasan tentang Dewan Perwakilan Rakyat kepada para siswa meliputi proses pemilihannya, bagaimana cara pemilihannya.

Ia juga menjelaskan sejarah bagaimana lembaga

"Tujuan kami hadir berkunjung ke gedung ini dalam rangka belajar. Anak-anak kami kelas 6, salah satu materi yang kami coba alirkan adalah tentang kepemimpinan. Tentunya anggota DPR ini adalah para pemimpin di tingkat negara Indonesia

**Hj. NUR AZIZAH
TAMHID, B.A.,M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Jawa Barat VI

Sambut Kunjungan STIU Al-Hikmah, **Kurniasih: Pentingnya Milenial Berinovasi dan Berkreasi**

Jakarta (07/11) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati, menerima kunjungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Dirosat Islamiyah Al- Hikmah Kota Jakarta di Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (07/11).

Dalam kunjungannya, Hafidzah selaku perwakilan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Dirosat Islamiyah Al- Hikmah menyampaikan maksud dari kedatangan rombongan mahasiswa tersebut untuk mendapatkan penjelasan dan pemahaman lebih dalam lagi mengenai DPR RI.

"Kami selaku mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Dirosat Islamiyah Al-Hikmah mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkunjung ke Fraksi PKS DPR RI. Tujuan kami berkunjung ke Fraksi PKS DPR RI ini adalah untuk belajar dan mengetahui lebih dalam lagi mengenai DPR RI meliputi

mekanisme pemilihan DPR RI, Tugas dan lain sebagainya." Ucap Hafidzah perwakilan mahasiswa STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah.

Dalam sambutannya, Kurniasih menyambut baik kedatangan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Dirosat Islamiyah Al-Hikmah dan menjelaskan apresiasi yang sebesar-besarnya atas program kunjungan ini.

"Alhamdulillah teman-teman bisa sampai di tempat ini. Selamat datang di rumah wakil rakyat. Kunjungan ini harus di manfaatkan dengan baik, mudah-mudahan dalam kesempatan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan buat teman-teman semua

tentang DPR RI. Saya memberikan apresiasi yang besar kepada teman-teman atas program kunjungan ke Fraksi PKS DPR RI ini," ucapnya.

Kurniasih memberikan informasi mengenai masih banyaknya tantangan yang di miliki komisi IX mengenai ketenagakerjaan, diantaranya angka pengangguran yang tinggi, skill SDM yang masih rendah, lapangan pekerjaan yang kurang serta persiapan bonus demografi mendatang.

"Komisi IX masih memiliki tantangan diantaranya, masih tingginya angka pengangguran hingga 5 juta orang, sekarang ini banyak lulusan S1 S2 sulit mendapatkan pekerjaan. Kita harus berpikir jangka panjang karena Indonesia akan bahkan sudah memiliki bonus demografi yang besar, dimana usia produktif lebih banyak. Dalam mempersiapkan hal ini yang paling utama adalah lapangan pekerjaan. Selain itu, Tantangan lainnya adalah harus bisa meningkatkan skill dari SDM yang dimiliki terutama milenial untuk bersaing di negara tetangga," ucap Anggota Komisi IX ini.



Kita harus berpikir jangka panjang karena Indonesia akan bahkan sudah memiliki bonus demografi yang besar, dimana usia produktif lebih banyak. Dalam mempersiapkan hal ini yang paling utama adalah lapangan pekerjaan.

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Diakhir perbincangan Kurniasih memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk selalu berikhtiar, berinovasi, mengupgrade skill dalam menghadapi perkembangan zaman serta teknologi yang semakin pesat.

"Sebagai generasi muda milenial harus terus belajar mengupgrade skill dan meningkat-

kan kompetensi di berbagai bidang. Selain itu, harus memiliki inovasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebagai stimulus bagi anak muda lain. Dengan bekal ikhtir, iman dan taqwa, skill berawasan global dan keterampilan yang kekinian insyallah kalian akan menjadi pemimpin hebat penerus kami semua," ucap Kurniasih.



Terima Kunjungan Santriwati SMAIT Darul Qur'an,

Fahmy Alaydroes Tekankan Pentingnya Kontribusi Generasi Muda

Jakarta (07/11) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, mengungkapkan pentingnya pemahaman sejarah bangsa serta kontribusi generasi muda mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan belajar dari para santriwati SMAIT Darul Qur'an, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat Fraksi PKS, Senayan, Jakarta, pada Selasa (07/11).

"Pemahaman sejarah

"Pemuda-pemudi adalah agen perubahan yang potensial dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. Kalian semua memiliki energi, kreativitas, dan semangat untuk berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan sosial",

**Dr. H. FAHMY
ALAYDROES, MM, M.Ed**

Anggota Komisi X DPR RI

bangsa adalah pondasi penting bagi generasi muda Indonesia untuk memahami akar sejarah negara ini. Pemahaman yang mendalam tentang perjalanan sejarah bangsa akan membantu pemuda-pemudi dalam merancang masa depan yang lebih baik", ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bogor tersebut.

Lebih lanjut, Fahmy menekankan peran krusial generasi muda dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

"Pemuda-pemudi adalah agen perubahan yang potensial dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. Kalian semua memiliki energi, kreativitas, dan semangat untuk berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan sosial", ungkap Fahmy kepada para santriwati.

Fahmy Alaydroes pun

berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif yang memperkuat pemahaman sejarah dan peran pemuda dalam pembangunan bangsa.

"Kita harus memberikan pendidikan yang baik, pelatihan, dan peluang bagi generasi muda kita. Bebaskan generasi penerus kita dari belenggu kebodohan menuju pencerahan dan kecerdasan," pungkasnya.

Oleh sebab itu, kata Habib Fahmy, Pemerintah, masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, perlu bersama-sama memberdayakan pemuda/i, termasuk santri dan santriwati.

"Dalam hal itu, salah satunya ialah memastikan anak-anak bangsa kita memiliki pemahaman yang kuat tentang sejarah dan peran penting mereka guna mencapai cita-cita bangsa", tegasnya.



Fahmy Alaydroes Ajak Generasi Muda Berkontribusi untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jakarta (07/11) -- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, mengajak generasi muda

mengajak generasi muda untuk dapat memberikan sumbangsih terbaik mereka dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945.

Hal ini disampaikan Fahmy saat menerima kunjungan para santri Pesantren Tahfidz dan Ekonomi Islam Multazam Bogor di Ruang Rapat Fraksi PKS, Senayan, Jakarta, pada Selasa (07/11/2023).

"Generasi muda adalah tulang punggung bangsa ini. Mereka memiliki energi, ide-ide segar, dan semangat untuk mencapai cita-cita luhur bangsa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945", ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Kab. Bogor tersebut.

Fahmy menggarisbawahi beberapa aspek penting yang harus diperhatikan oleh generasi muda, salah satunya ialah pendidikan berkualitas.

"Generasi muda perlu mendapatkan akses pendidikan berkualitas yang akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di era global", ujarnya lagi.

Ia juga mengingatkan kepada generasi muda untuk selalu menghormati nilai-nilai kebangsaan, seperti persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial.

Terakhir, ia pun menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi oleh generasi muda, termasuk perkembangan teknologi yang pesat dan tantangan lingkungan.

"Semoga generasi muda mampu menghadapi tantangan ini dengan bijak dan mampu memberikan sumbangsih terbaiknya dalam mewujudkan masa depan yang lebih cerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945".

"Generasi muda perlu mendapatkan akses pendidikan berkualitas yang akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di era global"

**Dr. H. FAHMY
ALAYDROES, MM, M.Ed**
Anggota Komisi X DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan **ASPIRASI ANDA** **DI HARI ASPIRASI** **FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>



Ketua FPKS: Dukungan Kemerdekaan Palestina adalah Bagian Konstitusi Negara Indonesia

Jakarta (31/10) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyatakan bahwa dukungan bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan rakyat Palestina adalah bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan konstitusi Indonesia.

Seminar Internasional untuk Mendukung Kemerdekaan Palestina:

**it's time for
PALESTINE
to be FREE !!**

Hal ini disampaikan dalam Seminar Internasional Fraksi PKS DPR RI bertajuk "It's Time for Palestine to be Free", di Jakarta, pada Selasa (31/10).

"Kemerdekaan Palestina merupakan tuntutan konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan", ujar Jazuli.

Sebagai sesama manusia, imbuh Jazuli, rakyat Indonesia memiliki tanggung jawab kemanusiaan untuk peduli terhadap nasib bangsa Palestina, khususnya terhadap gugurnya ribuan anak-anak dan ibu di Palestina akibat serangan Israel.

Indonesia, ujar Anggota DPR RI dari Dapil Banten II ini,

mempunyai utang sejarah terhadap Palestina.

"Pada saat Indonesia pertama kali merdeka, Palestina menjadi salah satu negara ataupun entitas politik pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Artinya, kita memiliki utang sejarah kepada bangsa Palestina yang hingga saat ini belum merasakan kemerdekaan", tegasnya.

Selain itu, Jazuli mengingatkan kepada rakyat Indonesia, bahwa tinggal Palestina, negara yang belum

merdeka sejak Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung tahun 1955 yang mendorong kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika.

Oleh sebab itu, Anggota Komisi I ini menyebut bahwa perlawanan rakyat Palestina adalah hal yang wajar untuk memperoleh hak mereka, yakni kemerdekaan.

"Sumber masalahnya adalah penjajah Zionis Israel yang sejak 1948 menajjah Palestina. Jika Palestina mendapatkan kemerdekaan atas tanahnya sendiri, tak lagi diduduki maupun dicaplok oleh Israel, saya yakin permasalahan akan selesai. Indonesia bersama negara-negara di dunia perlu segera memastikan terciptanya kemerdekaan Palestina tersebut", pungkasnya.

"Kemerdekaan Palestina merupakan tuntutan konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan",

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Jusuf Kalla: Konflik Palestina-Israel Butuh Kekuatan Kolektif Negara-Negara Islam

Jakarta (31/10) — Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Muhammad Jusuf Kalla meyakini bahwa melalui jalur perundingan dan kekuatan kolektif dari negara-negara Islam, maka konflik Palestina-Israel mampu diselesaikan.

Seminar Internasional untuk Mendukung Kemerdekaan Palestina:

**it's time for
PALESTINE
to be FREE !!**

Hal ini disampaikannya saat menjadi pengisi acara Seminar Internasional 'It's Time for Palestine to be Free!' hasil inisiasi Fraksi PKS DPR RI bersama Justice and Democracy Forum (JDF) yang digelar secara daring pada hari Selasa (31/10).

Jusuf Kalla, dalam penjelasannya merunut kembali konflik-konflik terdahulu yang telah terjadi antara Palestina dengan Israel.

Ia juga mengungkap bahwa konflik ini merupakan salah satu konflik terpanjang yang pernah ada. Konflik ini juga disebabkan oleh perbedaan pandangan antara kelompok Hamas dan Fatah yang sama-sama kuat di Palestina.

mendapat kemerdekaan bangsanya dan hal itu sah untuk dilakukan.

Akan tetapi, imbuhnya, dengan jatuhnya banyak korban membuat cara-cara peperangan sebaiknya tidak dilanjutkan.

"Mudah-mudahan Allah memberikan kita cara untuk mengatasi ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa ini hanya bisa diselesaikan dengan perundingan, dengan kerja sama, dan dengan kekuatan kebersamaan dari kita semua." ujarnya sebagai penutup.

Sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla juga menjelaskan bahwa saat ini organisasi yang ia pimpin terus berupaya menempuh jalur komunikasi agar tetap bisa memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban-korban di Palestina.

"Konflik ini melibatkan banyak negara sejak dulu, termasuk kekuatan besar Amerika serta Rusia atau Soviet zaman dulu. Kita mengharapkan bahwa ini dapat selesai dengan hasil kemerdekaan Palestina," ujar Jusuf Kalla.

Mantan Wakil Presiden RI tersebut juga menjelaskan bahwa serangan Hamas ke Israel baru-baru ini sejatinya merupakan upaya sebuah bangsa terjajah untuk

"Konflik ini melibatkan banyak negara sejak dulu, termasuk kekuatan besar Amerika serta Rusia atau Soviet zaman dulu. Kita mengharapkan bahwa ini dapat selesai dengan hasil kemerdekaan Palestina,"

**Dr. Dr. H. MUHAMMAD
JUSUF KALLA**

Wakil Presiden RI Ke 10 dan 12
Ketua Umum PMI

Wakil Ketua BKSAP FPKS Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Jakarta (31/10) — Wakil Ketua BKSAP DPR RI sekaligus Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, secara tegas dan konsisten menyatakan dukungan Indonesia terhadap Palestina,

dalam melawan Israel, imbuh Sukamta, bukanlah tindakan terorisme melainkan perlawanan dan upaya mempertahankan tanah airnya yang dirampas oleh Israel.

"Sesungguhnya, perlawanan rakyat Palestina adalah sama seperti ketika bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia", sebutnya.

Lebih lanjut, Sukamta menilai peran Indonesia sangat menentukan sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

"Jalur diplomasi sudah kita tempuh melalui forum parlemen dunia untuk segera memperjuangkan isu Kemerdekaan Palestina dan Resolusi untuk menghentikan Pemboman dan Pembunuhan di Gaza. Kita pun mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia yang disampaikan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi pada sidang DK PBB dengan ketegasan yang luar biasa untuk berpihak pada rakyat Palestina. Kami berharap negara-negara lain juga mengambil sikap tegas dalam mendukung Palestina", jelasnya lagi.

telah melakukan kejahatan yang luar biasa terhadap bangsa Palestina, sehingga tak bisa dibiarkan.

"Sangat banyak korban jiwa yang berjatuhan sejak deklarasi perang Israel pada 7 Oktober 2023. Hingga hari ini (30 Oktober 2023) jumlah korban tewas mencapai 8.100 orang, dan jumlah korban luka-luka sebanyak 5.445 orang, sebagian besar adalah anak-anak, perempuan dan, orang tua. Manuver berbahaya dan rangkaian kekerasan atau genosida ini harus segera dihentikan. Dampaknya akan sangat membahayakan keamanan regional dan dunia, dan bukan tidak mungkin menimbulkan risiko perang dalam skala yang lebih besar", jelas Anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini.

Tindakan bangsa Palestina

Seminar Internasional untuk Mendukung Kemerdekaan Palestina:
It's time for PALESTINE to be FREE !!

sekaligus meminta Israel menghentikan kejahatan perang dan genosida di wilayah Palestina.

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Internasional Fraksi PKS DPR RI bertajuk 'It's Time for Palestina to be Free', di Jakarta, pada Selasa (31/10).

"Forum seminar ini merupakan salah satu upaya kami dalam memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina yang saat ini sedang menghadapi serangan brutal Israel. Kita harus terus bersuara dan bersuara lebih lantang mengenai nasib rakyat Palestina", ujar Sukamta.

Menurut Sukamta, Israel



"Forum seminar ini merupakan salah satu upaya kami dalam memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina yang saat ini sedang menghadapi serangan brutal Israel. Kita harus terus bersuara dan bersuara lebih lantang mengenai nasib rakyat Palestina",

H. SUKAMTA, Ph.D

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Terakhir Sukamta meminta agar dunia harus mengambil langkah-langkah taktis dan strategis dalam melakukan resolusi konflik di Palestina.

"Pertama, dunia, khususnya PBB, harus mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya untuk segera menghentikan kejahatan Israel terhadap Palestina sebagai sasaran jangka pendek dan terus mendorong kemerdekaan Palestina secepatnya. Ke-

dua, mengajak seluruh elemen dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional. Ketiga, mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina berupa makanan, obat-obatan dan perbekalan lain yang diperlukan. Keempat, dunia harus membawa PM Israel Benjamin Netanyahu ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas kejahatan Israel terhadap kemanusiaan terhadap Palestina", pungkasnya.

Pakar HAM: Pengeboman Israel di Palestina adalah Kejahatan Kemanusiaan

Jakarta (31/10) — International Outreach Coordinator of the Stop the Wall Campaign and the Palestinian Land Defense Coalition, Mareen Mantovani menyampaikan peristiwa pengeboman pada 7 Oktober lalu, merupakan proses keberlanjutan rencana Israel untuk melakukan upaya pendudukan wilayah Palestina.

Seminar Internasional untuk Mendukung Kemerdekaan Palestina:

It's time for
PALESTINE
to be **FREE !!**

Hal ini disampaikan saat menjadi pengisi acara Seminar Internasional 'It's Time for Palestine to be Free!' hasil inisiasi Fraksi PKS DPR RI bersama Justice and Democracy Forum (JDF) yang digelar secara daring pada Selasa (31/10).

Mareen Mantovani, dalam menyampaikan tindakan Israel yang melakukan pengeboman di wilayah Gaza dan sekitarnya dikarenakan mereka ingin menyelesaikan proses

pendudukan Palestina yang belum terselesaikan sejak tahun 1948.

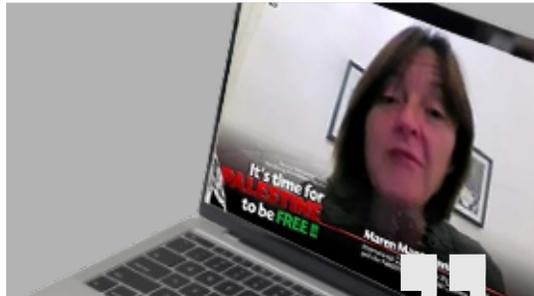
"Pada 2017 lalu Perdana Menteri Israel menyatakan rencananya dalam dokumen-dokumen publik yang dapat diakses dalam bahasa Inggris dan Ibrani tentang bagaimana cara meluluhlantahkan Gaza dengan cara memblokir jalur akses air, makanan, listrik dan pengeboman pada 7 Oktober kemarin itu tidak lagi mengejutkan karena sudah direncanakan sejak lama, apa yang sekarang terjadi saat ini adalah hanya melanjutkan rencana Israel sejak lama dan bukan hanya tentang membalas

aksi serangan dari Palestina," ujar Mareen Mantovani.

International Outreach Coordinator of the Stop the Wall Campaign and the Palestinian Land Defense Coalition, tersebut juga menjelaskan bahwa dalam kategori yang ditetapkan oleh PBB tindakan pengeboman yang dilakukan oleh Israel adalah kejahatan kemanusiaan terparah, hal tersebut di afirmasi oleh 800 akademisi di dunia, dan dari hasil penelitian salah satu warga Yahudi yang berada di dalam Parlemen Amerika itu sendiri.

"Indonesia sudah melakukan banyak hal untuk membawa perdamaian di Palestina, lalu upaya kita selanjutnya adalah tidak hanya untuk menghentikan pengeboman, tetapi juga masuk ke akar daripada permasalahan Palestina ini" tutur Mareen.

Sebagai bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang memegang nilai-nilai kemanusiaan, Mareen Mantovani menyerukan agar kepada seluruh negara dan masyarakat di seluruh dunia untuk tidak menormalisasi



kepada seluruh negara dan masyarakat di seluruh dunia untuk tidak menormalisasi tindakan kejahatan kemanusiaan Israel, dengan cara melakukan kampanye di media sosial, dan melakukan aksi dalam cara pandang perekonomian melalui pemberhentian kerjasama ekonomi, agar Israel tidak lagi merasa memiliki kekebalan hukum internasional, dan segera mendapatkan sanksi internasional untuk menghentikan tindakan genosidanya terhadap Palestina.

MAREEN MANTOVANI

International Outreach Coordinator of the Stop the Wall Campaign and the Palestinian Land Defense Coalition,

tindakan kejahatan kemanusiaan Israel, dengan cara melakukan kampanye di media sosial, dan melakukan aksi dalam cara pandang perekonomian melalui pemberhentian kerjasama

ekonomi, agar Israel tidak lagi merasa memiliki kekebalan hukum internasional, dan segera mendapatkan sanksi internasional untuk menghentikan tindakan genosidanya terhadap Palestina.



Prof. Hafidzi: Pengeboman Gaza Lebih Parah dari Hiroshima dan Nagasaki

Jakarta (31/10) — Honorary Advisor MyCARE Malaysia, Prof. Hafidzi M.Noor menyampaikan bahwa peristiwa pengeboman kemarin adalah peristiwa pengeboman paling brutal dan parah yang menewaskan warga sipil tidak bersenjata di Gaza.

Hal ini disampaikan saat menjadi pengisi acara Seminar Internasional 'It's Time for Palestine to be Free!' hasil inisiasi Fraksi PKS DPR RI bersama Justice and Democracy Forum (JDF) yang digelar secara daring pada hari Selasa (31/10).

“Ini adalah serangan brutal dan tidak terkendali terhadap warga sipil, ini adalah pembantaian dan pembersihan etnis yang tidak diragukan lagi”

Prof. Madya Dr. HAFIDZI MOHD NOOR

Honorary Advisor MyCARE Malaysia

Seminar Internasional untuk Mendukung Kemerdekaan Palestina:

it's time for PALESTINE to be FREE !!

Hafidzi dalam penjelasan menyampaikan bahwa pengeboman oleh Israel bahkan lebih parah dari peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, karena Israel menargetkan bom-bom tersebut ke sekolah, rumah sakit, masjid dan tempat-tempat umum, selain itu mereka bahkan melakukan pemenjaraan tanpa alasan kepada warga Gaza.

“Ini adalah serangan brutal dan tidak terkendali terhadap warga sipil, ini adalah pembantaian dan pembersihan etnis yang tidak diragukan lagi” tutur Hafidzi sebagai penutup.

Honorary Advisor MyCARE Malaysia tersebut juga menjelaskan bahwa Pemerintah Malaysia bersama negara-

negara di ASEAN telah menaruh banyak perhatian terhadap korban-korban pengeboman dari masyarakat Gaza termasuk anak-anak.

“Pemerintah Malaysia mengirimkan bantuan-bantuan kesehatan yang dikirim ke Gaza melalui Pemerintah Mesir,” ucapnya.

“Singkatnya, kita perlu melawan propaganda yang dilakukan oleh Zionis untuk membentuk pemikiran dan persepsi komunitas internasional” ujar Hafidzi.

Sebagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang memegang nilai-nilai kemanusiaan, Hafidzi menyerukan agar kepada seluruh pihak LSM atau NGO yang ada di seluruh dunia untuk mau mengirimkan bantuan kesehatan ke Gaza, karena bantuan kesehatan sangat diperlukan oleh mereka.



MK Tidak Terima Uji Materi Usia Maksimal Capres, HNW: Harusnya Makin Konsisten Kawal Konstitusi

Jakarta (24/10) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi MK yang memutuskan berdasarkan kewenangan konstitusional yang benar saat Mahkamah Konstitusi (MK)

menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi usia maksimal calon presiden (capres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seraya mengingatkan ke depan MK harus terus dan semakin konsisten dalam menegakkan hukum dan mengawal pelaksanaan konstitusi.

“Walau putusan MK hanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum, bukan ditolak, tetapi itu menunjukkan masih adanya konsistensi MK terhadap banyak putusan MK sebelumnya bahwa persoalan usia merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah, bukan kewenangan MK. Ini tetap patut diapresiasi, pasca putusan MK sebelumnya terkait usia cawapres yang dinilai tidak konsisten hingga mencoreng marwah dan wajah MK di mata masyarakat,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (24/10).

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa sikap

konsistensi MK untuk terus menjadi lembaga pengawal konstitusi harus makin ditunjukkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Apalagi, MK nanti akan menjadi pengadil bila terjadi sengketa hasil Pemilu termasuk Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Sementara saat ini saja ada tujuh laporan dugaan pelanggaran etik yang diduga

melibatkan Ketua MK Anwar Usman yang akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

“Dengan putusan seperti yang terakhir ini, penting ke depan MK dapat terus dan semakin konsisten dalam berlaku negarawan dalam penegakan hukum dan mengawal konstitusi,” tuturnya.

Putusan MK tersebut juga sejalan dengan apa yang telah dikritik dan disampaikan sebelumnya oleh HNW bahwa MK sudah sewajarnya menolak atau tidak menerima permohonan uji materi batas maksimal usia calon presiden ini. Pasalnya, selain memang tidak sejalan dengan aturan

BERIKUTNYA >>>

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa sikap konsistensi MK untuk terus menjadi lembaga pengawal konstitusi harus makin ditunjukkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Apalagi, MK nanti akan menjadi pengadil bila terjadi sengketa hasil Pemilu termasuk Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Sementara saat ini saja ada tujuh laporan dugaan pelanggaran etik yang diduga melibatkan Ketua MK Anwar Usman yang akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

MK Tidak Terima Uji Materi Usia Maksimal Capres, HNW: Harusnya Makin Konsisten Kawal Konstitusi

« SEBELUMNYA

konstitusi, permohonan ini dinilai dapat menimbulkan kegaduhan yang baru di tengah proses pemilu atau pilpres yang sedang berjalan menuju pelaksanaan Pemilu yang sudah semakin dekat.

HNW tidak mengungkiri bahwa permohonan itu apabila dikabulkan, sangat berpotensi menimbulkan kegaduhan politik, karena mudah ditebak, gugatan itu, dapat mengganjal salah satu kandidat bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto yang berusia melebihi 70 tahun sebagaimana yang disebutkan sebagai batas dalam permohonan itu. Bila itu dikabulkan, maka akan membuat tahun politik ini semakin gaduh dan tidak kondusif untuk penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 yang hanya tinggal empat bulan ke depan.

Meski bukan termasuk pengusung Prabowo sebagai Capres, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tetap memomorsatukan pelaksanaan Konstitusi dan hukum secara adil dan benar, karenanya HNW yang sebelumnya mengkritik putusan MK yang mengabulkan

gugatan agar sekalipun belum berusia 40 tahun tapi bila pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah maka yang bersangkutan dapat diajukan sebagai calon Wakil Presiden, HNW kembali menyerukan kepada seluruh pihak – termasuk para hakim konstitusi – untuk benar-benar konsisten menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan konstitusi dan aturan hukum yang berlaku.

“Konstitusi harus menjadi pegangan dan acuan pertama dan utama bagi kita bersama, terlepas siapa pun yang diuntungkan atau dirugikan. Dan MK harusnya jadi teladan. Jangan sampai MK malah kembali terjerumus ke dalam pusaran politik praktis yang seharusnya dihindari sebagai lembaga yudikatif yang independen, sebagai lembaga penegakan hukum tertinggi yang putusannya final dan mengikat. Itu agar Rakyat dan publik dapat kembali mempercayai hukum dan penegakan hukum di Indonesia, termasuk nanti yang terkait dengan bila ada sengketa penghitungan suara hasil Pemilu termasuk Pilpres,” pungkasnya.



“Walau putusan MK hanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum, bukan ditolak, tetapi itu menunjukkan masih adanya konsistensi MK terhadap banyak putusan MK sebelumnya bahwa persoalan usia merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah, bukan kewenangan MK.

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV-DPR-RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***